



**LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS
Ber-AKHLAK**

**OPTIMALISASI REKAPITULASI HAK PENGELOLAAN DENGAN
MEMANFAATKAN GOOGLE DRIVE SEBAGAI PENYEDIA
LAYANAN PENYIMPANAN DATA PADA KANTOR WILAYAH BPN
PROVINSI JAWA BARAT**

Disusun oleh:

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
NIP : 199211152022042001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN 2 ANGGARAN X
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul :

**Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan Dengan Memanfaatkan
Google Drive Sebagai Penyedia Layanan Penyimpanan Data Pada
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.**

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2022 Gelombang 2 Angkatan X :

Nama : Amalia Hardiani, S.H.

NIP : 199211152022042001

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Satuan/Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada
Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar
Aktualisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Senin, tanggal
05 September 2022.

Menyetujui:

Bogor, 03 September 2022

Bandung, 02 September 2022

COACH,

Suwarni, S.Pd, M.A.P

NIP : 19700705 199403 2 005

MENTOR,

Nandagia Darmadi, S.H., M.H.

NIP : 19760924 200312 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi yang disusun dan diajukan untuk persyaratan kelulusan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Gelombang 2 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan judul Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan Dengan Memanfaatkan *Google Drive* Sebagai Layanan Penyedia Penyimpanan Data Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.

Dalam penulisan Rancangan Aktualisasi ini Penulis mendapat banyak bantuan, motivasi, ide, saran, fasilitas dan materiil oleh karena itu Penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si. selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
2. Bapak Meijana Irawan Sukarja, S.H., selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
3. Bapak Nandagia Darmadi, S.H., M.H., selaku Mentor yang selalu memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama kegiatan aktualisasi dan habituasi
4. Ibu Suwarni S.Pd, M.A.P, selaku pembimbing (*coach*) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran membimbing penulis menyusun Rancangan Aktualisasi
5. Ibu Agustina Yessy Christiana, S.SiT., M.Eng. selaku penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis menyempurnakan Rancangan Aktualisasi ini
6. Seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
7. Seluruh jajaran pegawai di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

8. Rekan-rekan peserta Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Gelombang 2 Golongan III Tahun 2022, khususnya angkatan X Kelompok 2 dan rekan CPNS di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang telah saling menguatkan selama Pelatihan Dasar
9. Seluruh pihak yang telah membantu memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Teristimewa penulis persembahkan rasa terima kasih tiada tara kepada Kedua Orang Tua, Suami, Mertua dan Anak Penulis yang memotivasi dan memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Aktualisasi ini. Penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan Rancangan Aktualisasi ini. Hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki penulis. Penulis dengan senang hati akan terus mempelajari demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga penulisan ini bermanfaat bagi Penulis sendiri dan bagi Instansi.

Bandung, 02 September 2022

Penulis,



Amalia Hardiani, S.H.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Bagan	vii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Organisasi.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	5
D. Struktur Organisasi.....	9
E. Program Dan Kegiatan Saat Ini.....	11
Bab II Rancangan Aktualisasi	
A. Identifikasi Isu.....	12
B. Pemilihan Isu.....	18
C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu.....	22
D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi.....	27
E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	40
Bab III Pelaksanaan Aktualisasi	
A. Role Model.....	42
B. Realisasi Kegiatan.....	44
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi.....	82
D. Tindak Lanjut.....	85
Bab IV Penutup	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi.....	990
Daftar Pustaka	92
Lampiran	94
Biodata Penulis	134

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Arah Kebijakan Strategi
2. Tabel 2 Metode USG
3. Tabel 3 Gagasan Pemecah Masalah
4. Tabel 4 Metode Efektif, Efisien, Kemudahan
5. Tabel 5 Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi
6. Tabel 6 Matriks Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai-nilai Ber-AKHLAK
7. Tabel 7 Jadwal Tahapan Kegiatan
8. Tabel 8 Biodata Role Model
9. Tabel 9 Rekapitulasi Habitiasi nilai-nilai berakhlak
10. Tabel 10 Tabel Tindak Lanjut Aktualisasi

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
2. Gambar 2 Lokasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
3. Gambar 3 Loker Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
4. Gambar 4 Screenshoot KKP Data HPL Kota Bandung
5. Gambar 5 Screenshoot KKP Data HPL Kabupaten Bandung
6. Gambar 6 Tampilan menu utama *e-office*
7. Gambar 7 Diagram *fishbone*
8. Gambar 8 Bapak Nandagia Darmadi, S.H., M.H.
9. Gambar 9 Akun Gmail Bidang PHP
10. Gambar 10 Folder Per-Kantah
11. Gambar 11 Format Surat Permintaan Data HPL ke Kantah
12. Gambar 12 Data HPL KKP Kota Bandung
13. Gambar 13 Surat Tugas ke Kantah Kabupaten Bandung
14. Gambar 14 Merekap data HPL Kota Bandung
15. Gambar 15 Surat Permintaan data HPL ke Pemegang Hak
16. Gambar 16 Google forms
17. Gambar 17 Scan QR Rekapitulasi HPL
18. Gambar 18 Testimoni Kantah Kota Bandung
19. Gambar 19 Testimoni Kantah Kabupaten Bandung

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1 Struktur Organisasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latsar atau Pelatihan Dasar adalah salah satu syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 34 bahwa CPNS wajib menjalankan masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang mana masa percobaan yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah Latsar. Latsar wajib ditempuh oleh seorang CPNS yang mana dilakukakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan secara terintegrasi yang mana sebagaimana Pasal 34 ayat (4) bahwa tujuannya adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme juga kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme juga kompetensi bidang. Pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh LAN.

Mengenai syarat menjadi seorang PNS sebagaimana Pasal 36 Peraturan Pemerintah tersebut diatas bahwa terdapat dua syarat yakni: Lulus Pelatihan Dasar dan sehat jasmani juga rohani. Pelatihan Dasar CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 terdiri dari lima tahapan yakni dimulai dengan Self Learning yang mana peserta latsar melaksanakan mata pelatihan secara masing-masing; Distance Learning yang mana peserta latsar menerima materi yang diberikan oleh widyaiswara dari PPSDM Kementerian ATR/BPN via daring ditempat kerja masing-masing; Aktualisasi (*Off Class*) para peserta melaksanakan aktualisasi yang telah dirancang di tempat kerja masing-masing; Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) yang terdiri dari Kompetensi Teknis Administratif dan Kompetensi

Teknis Substantif; dan tahapan yang terakhir adalah Klasikal yang dilaksanakan di PPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor.

Penulis merupakan CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Formasi Tahun 2021 selaku Analis Hukum Pertanahan dengan Golongan III/a dan penempatan di unit kerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu isu yang diangkat pada aktualisasi ini adalah isu yang dapat ditemukan pada unit kerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Isu yang dibahas yaitu *pertama*, Belum adanya fasilitas panduan persyaratan yang harus dilengkapi bagi masyarakat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, *kedua*, belum optimalnya kualitas data rekapitulasi Hak Pengelolaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, *ketiga*, belum efektifnya penggunaan aplikasi *e-office* di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.

Dari ketiga isu tersebut diatas, isu yang Penulis angkat sebagai aktualisasi adalah isu kedua yaitu mengenai belum optimalnya kualitas data Rekapitulasi data Hak Pengelolaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Alasan dipilihnya isu tersebut karena terkait fungsi Kantor Wilayah dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, yaitu untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Selain itu data HPL ini juga bermanfaat untuk inventarisasi data pertanahan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat meskipun masih sebatas rekapitulasi data HPL di beberapa kantah saja. Namun kegiatan ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan rekapitulasi di seluruh Kantah se-Provinsi Jawa Barat untuk keberlanjutan kegiatan kedepannya.

Jika isu ini tidak dilaksanakan dapat menghambat kegiatan pelaporan kegiatan pertanahan. Mengingat Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian dikerjasamakan dengan pihak lain maka perlu bagi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk selalu mendata dan memonitoring kegiatan pertanahan Hak Pengelolaan yang ada di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penulis melaksanakan kegiatan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan Dengan Memanfaatkan *Google Drive* Sebagai Penyedia Layanan Penyimpanan Data Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat” yang telah penulis laksanakan selama masa Habitiasi.

B. Tujuan Organisasi

Pada lampiran Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 diuraikan mengenai Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN. Visinya yaitu :

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi tersebut secara langsung akan menjadi pedoman secara langsung untuk mencapai target kinerja yang hendak dicapai untuk lima tahun mendatang. Secara garis besar terdapat tujuh Rencana Strategis pada periode 2020-2024 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Misi Kementerian ATR/BPN untuk mencapai visi tersebut antara lain:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Tujuan dan sasaran Kementerian disusun sebagai implementasi atau penjabaran misi dengan target spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan Kementerian terkait misi-misi tersebut antara lain :

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Moto Kementerian ATR/BPN berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN RI Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 Tahun 2020 Tentang Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN yaitu:

1. Melayani: Bahwa dalam bekerja berupaya memberikan layanan berstandar dunia dengan orientasi pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan
2. Profesional: bahwa dalam bekerja mengutamakan kolaborasi, bersikap terbuka, selalu bersemangat dalam menghadapi perubahan termasuk terhadap perubahan teknologi

3. Terpercaya: bahwa dalam bekerja, berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan cara terbaik dan benar, memegang teguh kode etik, amanat jabatan dan prinsip-prinsip moral

Kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Penulis mengenai Optimalisasi Rekapitulasi Data Hak Pengelolaan dengan memanfaatkan *Google Drive* sebagai layanan penyimpanan data pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari visi dan misi dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian ATR/BPN yaitu:

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
Tujuan 3: Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komperhensif dan Berstandar Pemerintahan yang Baik			
Aspek Kelembagaan	Aspek Proses Bisnis: Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berbasis elektronik, serta percepatan dan modernisasi layanan administrasi pertanahan		<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Sistem Berbasis Elektronik termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital - Peningkatan kualitas proses dan output/keluaran administrasi pertanahan - Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Tabel 1 Arah kebijakan strategi

C. TUGAS DAN FUNGSI

Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Survei dan Pemetaan;
- c. Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- d. Bidang Penataan dan Pemberdayaan;
- e. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
- f. Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada lampiran II merujuk pada poin kelima terkait uraian jabatan Analis Hukum Pertanahan pada satuan kerja daerah antara lain :

1. Menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan;
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat- surat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan Tanah berdasarkan disposisi pimpinan;
3. Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah;
5. Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;
6. Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah;
7. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan gugatan dari PTUN, Perdata, Pidana dan Pengadilan Agama;
9. Menyusun dan menganalisis bahan Surat Kuasa;
10. Menyusun dan menganalisis bahan jawaban atas gugatan yang masuk;
11. Menyusun dan menganalisis bahan duplik;
12. Menyiapkan bahan peninjauan lapangan (survei Lokasi);
13. Menyusun dan menganalisis bahan kesimpulan sidang;
14. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori banding;
15. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori kasasi;
16. Menyusun dan menganalisis bahan memori kasasi;
17. Menyusun dan menganalisis pembatalan sertifikat;
18. Mengumpulkan bahan dalam rangka mengumpulkan bukti baru untuk peninjauan kembali;
19. Menyusun dan menganalisis bahan kontra PK;
20. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum pertanahan;
21. Mengklasifikasikan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
22. Menganalisis masalah pertanahan yang menjadi penyebab sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
23. Membuat resume permasalahan secara sistimatis dan terukur;

24. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar internal atas sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
25. Menyusun peta masalah;
26. Membuat risalah pengolahan data masalah pertanahan;
27. Mempersiapkan konsep usulan pembatalan hak atas tanah; dan
28. Menerima hasil analisis masalah pertanahan;
29. Mempelajari hasil analisis masalah pertanahan sebagai bahan persiapan mediasi;
30. Mengumpulkan data pendukung fisik, administrasi dan yuridis sebagai bahan pendukung hasil analisis;
31. Mempersiapkan konsep undangan mediasi untuk para pihak;
32. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar mediasi atas Sengketa dan Konflik Pertanahan;
33. Membuat notulen, berita acara dan laporan hasil mediasi; dan
34. Menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan.

D. STRUKTUR ORGANISASI KANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT



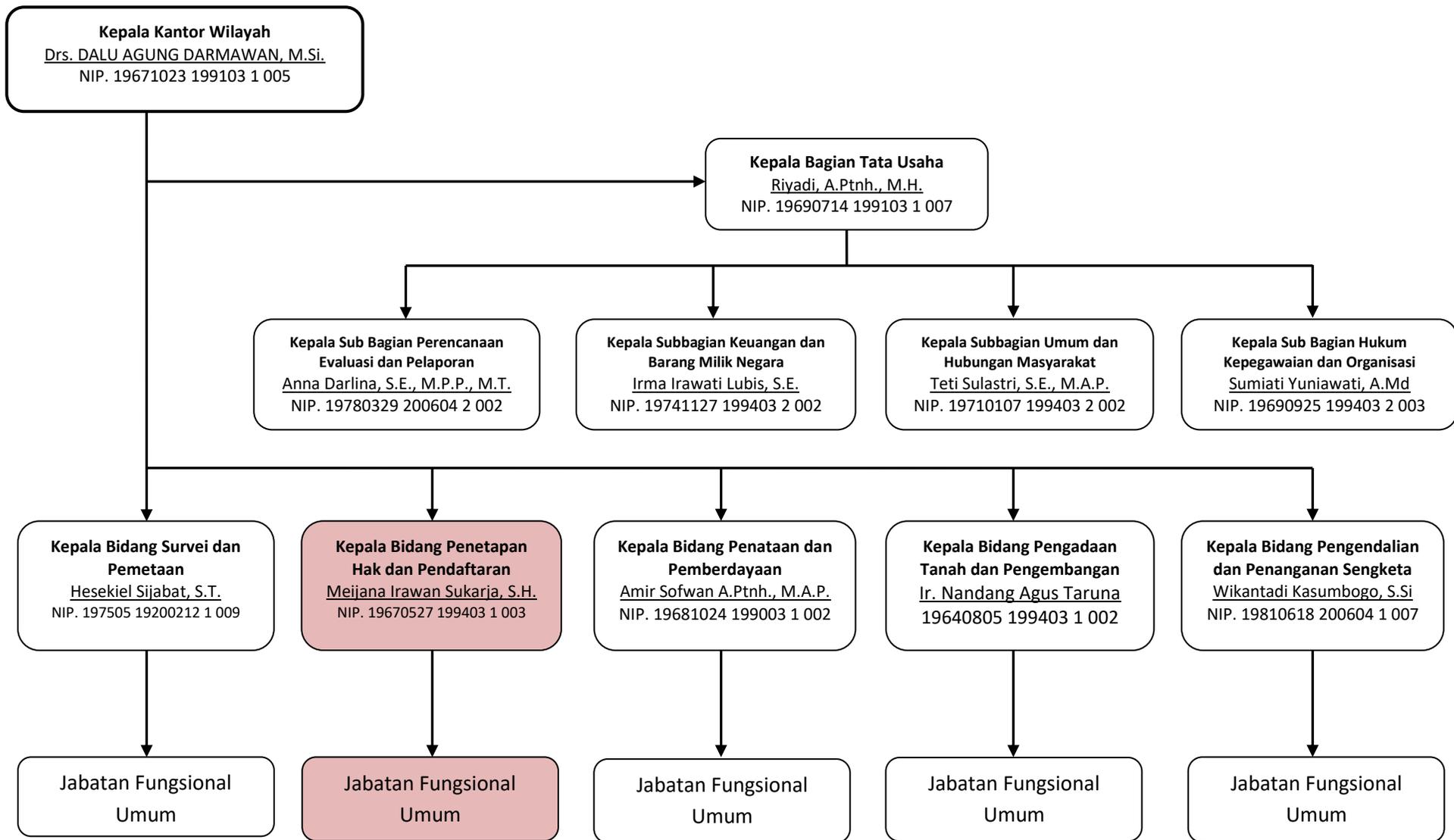
Gambar 1 Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat



Gambar 2 Lokasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Soekarno-Hatta No.586, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

Penulis ditempatkan di Unit Kerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dengan jabatan Analis Hukum Pertanahan yang secara rinci dapat dilihat pada bagan struktur organisasi di bawah ini.



Bagan 1 Struktur Organisasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

E. Program Dan Kegiatan Saat Ini

Program dan Kegiatan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang dikerjakan saat ini yaitu:

1. Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT
 - Sertifikasi Profesi dan SDM
 - Lisensi PPAT
 - **Pemantauan lembaga**
 - Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah
 - Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah
2. Penetapan Hak Tanah dan Ruang
 - Pelayanan Publik kepada lembaga
 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD
 - Pelayanan Publik Lainnya
 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum
 - Sistem Informasi Pemerintahan
 - Data Tanah Instansi Pemerintah
3. Pendaftaran Tanah dan Ruang
 - Pelayanan Publik Lainnya
 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali
 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan
 - Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - Pelayanan Publik kepada masyarakat
 - Pelayanan Publik kepada lembaga

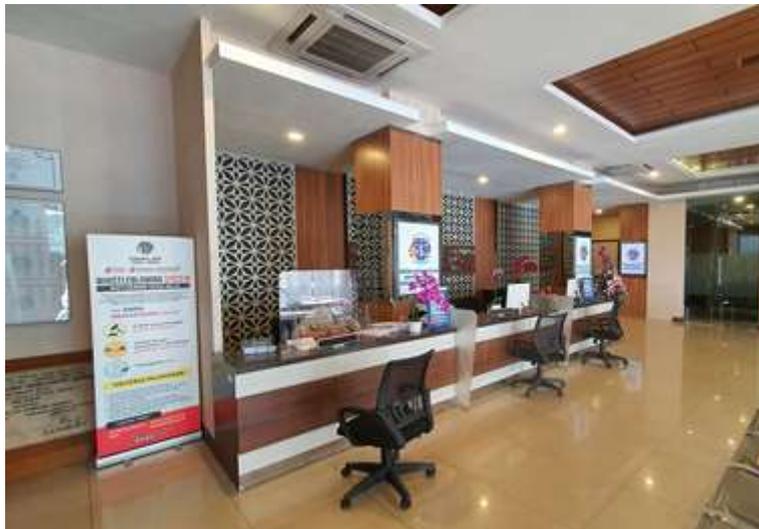
BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASI ISU

Penulis merupakan Calon PNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Formasi Tahun 2021 selaku Analis Hukum Pertanahan dengan Golongan III/a dan penempatan di unit kerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama Penulis bekerja kurang lebih 1 bulan lamanya, sejak Mei 2022 hingga saat ini terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian, diantaranya:

- I. Belum adanya fasilitas panduan persyaratan yang harus dilengkapi bagi masyarakat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat**



Gambar 3 Loker Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Selama penulis bekerja di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, penulis beberapa kali menemukan kasus dimana masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk pendaftaran pertama kali masih banyak yang masih belum memahami perihal

persyaratan apa saja yang diperlukan dan tata caranya. Masih banyak masyarakat yang bingung kemana harus mengajukan permohonan pendaftaran, apakah permohonan tersebut merupakan kewenangan kanwil atau kewenangan kantah. Seringkali juga masyarakat harus berkali-kali datang ke kantor akibat persyaratan permohonan yang belum lengkap ataupun salah mengajukan permohonan misalnya yang seharusnya mengajukan permohonan untuk pendaftaran pertama kali hak atas tanah malah hanya mengajukan permohonan pengukuran sedangkan yang dimaksudkan oleh mereka adalah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanahnya.

Hal tersebut terjadi karena belum adanya panduan yang jelas di lingkungan kantor wilayah BPN provinsi Jawa Barat mengenai persyaratan permohonan pendaftaran hak atas tanah khususnya untuk Permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan berkas permohonan karena tidak tersedianya informasi berupa buku panduan di kantor wilayah BPN maupun dalam bentuk digital yang dapat diakses secara online. Masyarakat masih harus bertanya langsung kepada pegawai di loket dan itupun belum tentu mendapat arahan atau petunjuk yang jelas dan lengkap dikarenakan keterbatasan pengetahuan pegawai mengenai tata cara dan proses pendaftaran tanah.

Dampak dari tidak adanya panduan yang jelas mengenai kelengkapan berkas permohonan dapat menghambat proses administrasi pendaftaran hak atas tanah di kanwil dan juga menyulitkan pegawai untuk mengecek berkas apa saja yang sudah atau belum dilengkapi. Pemohon akan memakan waktu lama hanya untuk mengumpulkan berkas akibat berkas

permohonan yang kurang atau lupa untuk dilengkapi. Jika sudah terdapat panduan yang jelas dan lengkap tentunya dapat membantu masyarakat dalam mengumpulkan berkas lebih cepat juga membantu pegawai untuk menjelaskan persyaratan lebih detail.

Isu ini memiliki keterkaitan dengan Smart ASN karena dengan diberikannya informasi yang bukan hanya secara konvensional tapi juga secara digital yang dapat mempermudah masyarakat maupun instansi mengakses informasi berarti menerapkan Smart ASN yaitu kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Isu ini juga memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN yang mana salah satu peran ASN adalah sebagai pelayan publik.

II. Belum optimalnya kualitas data Rekapitulasi Hak Pengelolaan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

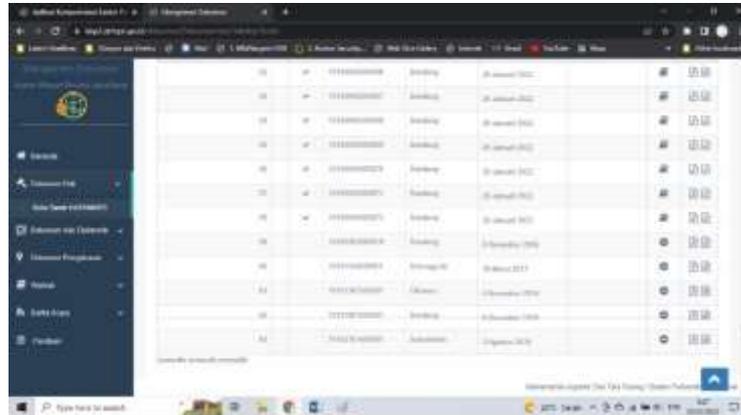
Pada saat ini kualitas data rekapitulasi Hak Pengelolaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Rekapitulasi Hak Pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk panduan ataupun inventarisasi data pertanahan HPL baik di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat maupun di kantah-kantah di Provinsi Jawa Barat serta rekapitulasi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan awal untuk laporan dalam hal dimintakan oleh Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional.

Hak Pengelolaan adalah bagian dari hak menguasai dari negara yang menurut sifat dan pada dasarnya, kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Daerah-daerah swatantra (sekarang Pemerintah Daerah), baru mempunyai wewenang

tersebut apabila ada pelimpahan (pendelegasian) wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah oleh negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah. Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Subjek HPL antara lain, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) PT Persero, badan otoritas, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Hak Pengelolaan dapat digunakan untuk keperluan usaha pemegangnya sendiri dan karena kebutuhan praktis, yakni untuk memberikan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga melalui perjanjian antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga.

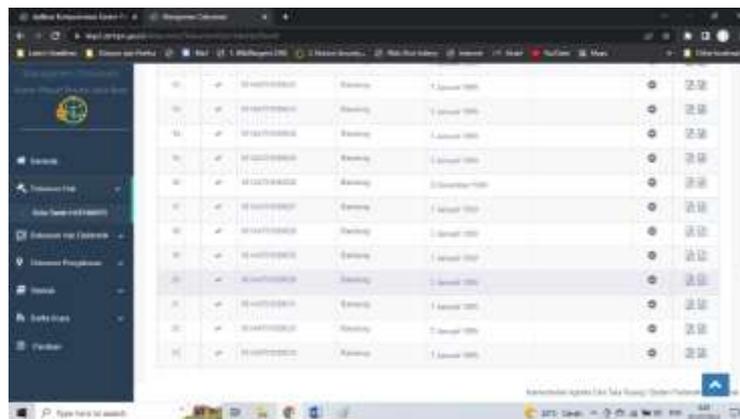
Data HPL sebenarnya sudah terdapat dalam KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) namun seringkali data yang terdapat di KKP tidak aktual atau kurang update karena pengarsipan di Kantor Pertanahan yang kurang baik sehingga tidak semua data yang ada direkap baik secara manual maupun di input secara digital di KKP, selain itu terdapat data-data seperti misalnya nama pemegang hak dan NIB yang tidak di input, maka dari itu data yang terdapat di KKP seringkali tidak sesuai dengan data yang terdapat pada arsip Kantor Pertanahan. Berdasarkan KKP data HPL yang terdaftar per Juni 2022 untuk Kota Bandung ada 62 HPL yang masih berlaku dan 1 HPL yang sudah tidak berlaku, kemudian untuk Kabupaten Bandung terdapat 23 HPL yang masih berlaku. Penting bagi Kantor Wilayah BPN provinsi Jawa Barat untuk memantau dan mengetahui data Hak Pengelolaan yang berlaku pada saat ini mengingat Hak pengelolaan merupakan hak menguasai negara atas tanah yang nantinya tanah tersebut dapat dipergunakan

untuk kepentingan sendiri oleh pemegang haknya dan dapat pula dipergunakan atau dikerjasamakan dengan pihak lain atas persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.



ID	Nama	Tanggal	
01	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
02	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
03	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
04	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
05	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
06	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
07	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
08	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
09	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
10	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
11	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
12	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
13	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
14	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
15	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
16	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
17	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
18	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
19	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
20	011000000000	Bandung	01 Januari 2017

Gambar 4 Screenshot KKP Data HPL Kota Bandung



ID	Nama	Tanggal	
01	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
02	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
03	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
04	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
05	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
06	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
07	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
08	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
09	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
10	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
11	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
12	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
13	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
14	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
15	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
16	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
17	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
18	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
19	011000000000	Bandung	01 Januari 2017
20	011000000000	Bandung	01 Januari 2017

Gambar 5 Screenshot KKP Data HPL Kabupaten Bandung

Dampak dari tidak dilaksanakannya penyelesaian isu ini untuk jangka pendek tidak membawakan dampak yang terlalu buruk khususnya untuk satuan kerja, namun untuk jangka panjang jika tidak dilaksanakan akan menghambat proses monitoring dan laporan kepada Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional mengingat menurut Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri ATR/ Ka BPN Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, salah satu fungsi dari Kantor Wilayah adalah untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Selain itu data HPL ini juga

bermanfaat untuk inventarisasi data pertanahan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Isu ini memiliki keterkaitan dengan Smart ASN karena dengan membuat rekapitulasi secara rinci mengenai data pertanahan khususnya Hak Pengelolaan yang memanfaatkan *Google Drive* sebagai teknologi masa kini untuk mempermudah akses dan dapat diupdate dan diakses oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan juga setiap Kantah yang ada di Jawa Barat berarti mewujudkan transformasi digital yang baik. Isu ini juga memiliki keterkaitan dengan Manajemen ASN mengenai tugas dan fungsi ASN sebagai Pelayan Publik yaitu berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

III. **Belum efektifnya penggunaan aplikasi *e-office* di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.**



Gambar 6 Tampilan menu utama *e-office*

Mengenai judul diatas memiliki relevansi dengan bahasan Manajemen ASN oleh karena penggunaan aplikasi *e-office* merupakan tool penunjang bagi satker untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien berbasis digital. Aplikasi *E-Office* adalah terobosan yang diterapkan di lingkup Kementerian ATR/BPN yang mulai berlaku Tanggal 8 November 2020 bahwasanya visi yang hendak dicapai adalah menuju perkantoran modern yang berbasis digital.

Fasilitas dari *E-Office* sendiri antara lain administrasi

perkantoran dan korespondensi nirkertas; tanda tangan elektronik yang terverifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE); log-in terhubung otomatis pada dashboard PTSL; dan presensi dengan pengenalan wajah.

Terdapat banyak sekali keuntungan yang bisa digunakan pada aplikasi tersebut yang membuat beban pekerjaan jauh lebih ringan dan efisien, namun implementasinya di Satuan Kerja Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat belum maksimal. Hingga saat ini aplikasi *E-Office* baru digunakan untuk presensi sehari-hari dan kegiatan surat-menyurat antar bidang dan itupun tidak semua pegawai menggunakannya oleh karena terdapat faktor-faktor keterbatasan terkait peranti yang digunakan dan kurangnya pengetahuan tentang cara menggunakan aplikasi. Fitur yang sangat penting yakni administrasi perkantoran justru belum diterapkan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan beberapa alasan pertimbangan yang salah satunya adalah faktor kemalasan migrasi dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang cukup sulit untuk ditembus.

B. PEMILIHAN ISU

Dari hasil identifikasi isu atau masalah yang sudah ada, dilakukan pemilahan isu untuk menentukan isu yang paling memiliki dampak bagi satuan kerja Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Dalam menemukan *core issue* terdapat beberapa metode yang bisa digunakan yakni teknik AKPK atau Teknik USG.

Teknik AKPK yaitu menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) dengan kriteria Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan. Pada penulisan ini yang akan digunakan adalah teknik yang kedua yakni teknik tapisan USG. Teknik tapisan USG kurang lebih hampir sama dengan teknik tapisan yang sebelumnya yakni menetapkan rentang penilaian dengan skala yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Isu terkait

yang mana pada pemilihan isu ini akan digunakan rentang penilaian (1-5). Kriteria pada teknik tapisan USG berpatokan pada:

1. *Urgency*

Bahwa penilaian pada kriteria ini adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.

2. *Seriousness*

Berangkat dari seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

3. *Growth*

Potensi memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Maka dari itu untuk menerapkan teknik tapisan tersebut dapat memanfaatkan tabel penilaian dari masing-masing isu yang telah dikemukakan, sebagai berikut :

No	Isu	U	S	G	Jumlah	Prioritas
1	Belum adanya fasilitas panduan persyaratan yang harus dilengkapi bagi masyarakat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat	3	4	4	11	II
2	Belum optimalnya kualitas data Rekapitulasi Hak Pengelolaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat	5	5	4	14	I
3	Belum efektifnya penggunaan aplikasi e-office di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat BPN Jawa Barat	3	3	3	9	III

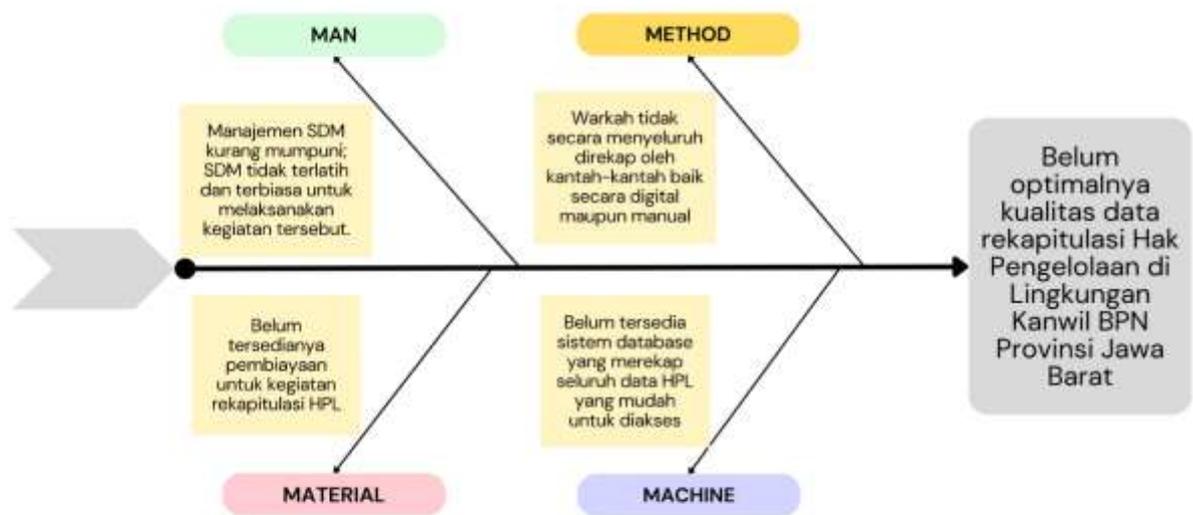
Tabel 2 Metode USG

Indikator:

- USG 5 = Sangat mendesak, perlu untuk segera ditindaklanjuti, harus dibahas karena akan berdampak buruk bagi instansi dan banyak orang jika tidak ditangani
- 4 = Mendesak, perlu ditindaklanjuti dan dibahas karena akan berdampak buruk bagi instansi jika tidak ditangani
- 3 = Cukup mendesak dan dianjurkan untuk ditindaklanjuti karena apabila tidak ditangani berpotensi memberikan dampak buruk bagi instansi
- 2 = Kurang mendesak, kurang begitu perlu untuk ditindaklanjuti dan tidak terlalu berdampak bagi instansi dan masyarakat
- 1 = Tidak mendesak, tidak perlu ditindaklanjuti dan tidak akan berdampak bagi instansi dan masyarakat

Setelah menetapkan *core issue* menggunakan teknik tapisan USG, maka didapatkan isu mengenai belum optimalnya Rekapitulasi Hak Pengelolaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat sebagai prioritas pertama untuk dijadikan isu utama. Dari isu tersebut kemudian dijadikan rumusan isu berupa “*Belum optimalnya kualitas data Rekapitulasi Hak Pengelolaan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat*”.

Analisis isu yang digunakan untuk rumusan isu tersebut menggunakan pendekatan *fishbone diagram* dengan berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian *fishbone diagram* atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai *Cause-and-Effect Diagram* atau *Ishikawa Diagram*. Hasil *fishbone diagram* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7 Diagram fishbone

Dari diagram *fishbone* diatas terlihat bahwa terdapat beberapa penyebab terkait core issue tersebut, dimulai dari aspek MAN yang mana merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan manajemen ASN terkait peranan ASN sebagai Pelayan Publik bahwa ASN harus memiliki kompetensi atau keahlian sesuai tugas dan fungsinya sehingga dapat bekerja secara optimal. Kemudian, terkait pembiayaan memang belum ada DIPA secara khusus yang mengakomodir terkait pembuatan rekapitulasi namun sesungguhnya kegiatan ini tidak membutuhkan banyak biaya karena dewasa ini koordinasi dapat dilakukan via daring dan laporan dapat dikirimkan via email atau sosial media lainnya. Peranti elektronik untuk menunjang kegiatan ini sudah tersedia namun yang masih perlu dilengkapi adalah database yang bisa diakses secara mudah dimanapun oleh internal satuan kerja khususnya di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan *Method*, penyimpanan warkah tidak seluruhnya direkap baik secara manual maupun digital untuk memudahkan dikemudian hari jika membutuhkan data Warkah tersebut. Maka akibatnya rekapitulasi HPL di Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung belum seluruhnya ter-rekap.

C. PENENTUAN GAGASAN PEMECAH ISU

Setelah dilakukan analisa dengan diagram fishbone, maka didapatkan beberapa penyebab munculnya masalah tersebut. Susunan rekomendasi penyelesaian isu yang dapat dilakukan seperti pada tabel berikut:

Isu	Belum Optimalnya Kualitas Data Rekapitulasi Hak Pengelolaan	
Penyebab	Manajemen SDM kurang mumpuni dan tidak terlatih serta terbiasa untuk melaksanakan kegiatan rekapitulasi	
Alternatif Penyelesaian	Tahapan Alternatif	Hasil Yang Diharapkan
Koordinasi dengan PPSDM Kementerian ATR/BPN untuk mengusulkan pelatihan pegawai terkait rekapitulasi HPL	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantah di Provinsi Jawa Barat Menyusun proposal untuk kegiatan pelatihan rekapitulasi hak atas tanah 	Adanya sumber daya manusia yang terlatih untuk melaksanakan kegiatan rekapitulasi HPL.
Penyebab	Warkah tidak secara menyeluruh direkap oleh kantah-kantah baik secara digital maupun manual	
Alternatif Penyelesaian	Tahapan Alternatif	Hasil Yang Diharapkan
Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan memanfaatkan <i>Google Drive</i> sebagai penyedia	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Kantah-Kantah yang akan direkap data HPL Merekap HPL Menyandingkan rekap data HPL yang 	Ter-rekapnya data HPL di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan arsip atau inventarisasi data HPL pada Kanwil BPN

layanan penyimpanan data pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat	dikirimkan oleh Kantah dengan data HPL dalam KKP 4. Membuat <i>google forms</i> terhubung dengan <i>google drive</i> untuk menyimpan hasil rekapitulasi HPL yang dapat diakses oleh Kantah-kantah juga dapat diperbaharui atau diupdated oleh masing-masing Kantah jika terdapat HPL yang baru diterbitkan.	Provinsi Jawa Barat dan bahan untuk pelaporan kepada Pusat.
Penyebab	Belum tersedianya database berbasis website yang merekap seluruh data HPL	
Alternatif Penyelesaian	Tahapan Alternatif	Hasil Yang Diharapkan
Membangun server mandiri berbasis website untuk rekapitulasi HPL di satker Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun server mandiri dengan bantuan tenaga ahli bidang IT 2. Membuat desain website yang menarik dan mudah dipahami 3. Menginput rekapitulasi yang dapat dengan mudah diakses oleh kantah-kantah serta mudah 	Tersedianya website khusus rekapitulasi HPL yang dapat diakses dengan mudah oleh satker di Provinsi Jawa Barat

	untuk dilakukannya perbaikan data	
--	-----------------------------------	--

Tabel 3 : Gagasan Pemecah Masalah

Dari ketiga gagasan tersebut perlu ditelaah mana sekiranya gagasan yang paling efektif dan efisien dapat dilaksanakan dan realistis dapat dilaksanakan. Untuk menemukan gagasan mana yang paling sesuai maka dalam hal ini akan menggunakan metode tapisan untuk mengkualifikasi gagasan-gagasan tersebut diatas yang mana akan menggunakan 3 (tiga) aspek penilaian antara lain Efektif, Efisien, dan Kemudahan, yang akan disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

No.	Gagasan Pemecah Isu	Penyebab	Efektif (1-5)	Efisien (1-5)	Kemudahan (1-5)	Total
1	Koordinasi dengan PPSDM Kementerian ATR/BPN untuk mengusulkan pelatihan pegawai terkait kegiatan rekapitulasi	<i>MAN</i>	5	3	3	11
2	Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan memanfaatkan <i>Google Drive</i> sebagai penyedia layanan penyimpanan data pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat	<i>METHOD</i>	5	5	4	14

3	Membangun server mandiri berbasis website untuk rekapitulasi HPL di satker Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat	MILIEU	3	3	3	9
---	---	--------	---	---	---	---

Tabel 4 : Metode efektif, efisien, kemudahan

Matriks diatas menghasilkan bahwa gagasan pemecah isu nomor dua adalah yang paling bijak untuk dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan tentunya, namun sebelum itu perlu diketahui pertimbangan-pertimbangan terkait gagasan kreatif kesatu dan ketiga terlebih dahulu. Gagasan kesatu dari segi efektifitas merupakan gagasan yang cukup efektif dengan pertimbangan melaksanakan pelatihan pegawai dengan bekerja sama dengan PPSDM berpotensi membangun etos kerja baru yang diharapkan menghasilkan output yang jauh lebih baik. Kemudian terkait efisiensi, sangat tidak efisien karena akan membutuhkan tenaga dan biaya yang besar untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Terakhir dari segi kemudahan sangat tidak mudah karena dibutuhkan banyak *effort* untuk melaksanakannya.

Selanjutnya mengenai gagasan pemecah isu yang ketiga secara efektifitas, efisiensi dan kemudahan sama-sama mendapat poin 3 karena membangun server mandiri berbasis website tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta membutuhkan keahlian khusus di bidang IT serta biaya yang tidak sedikit, sehingga menurut saya kurang tepat untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan *budget* terbatas ini.

Maka dari kedua gagasan tersebut diatas menjadi bahan pertimbangan yakni sisi realistis dengan kata lain dalam hal ini berusaha menggunakan gagasan yang paling bijak dan paling

mungkin dieksekusi dalam kurun waktu dekat, maka terpilih gagasan untuk memecahkan *core issue* pada penulisan ini yakni dari aspek *Method*. Dilihat dari segi efektifitas gagasan yang kedua sangat cukup efektif dengan pertimbangan penggunaan *google drive* sangat mudah dan dapat diakses dari mana saja. Kemudian dari segi efisiensi juga sangat cukup efisien karena dalam pembuatannya tidak memakan biaya yang terlalu besar dan juga tenaga. Sedangkan dari segi kemudahan pada dasarnya kegiatan ini tidak terlalu mudah jika merekap seluruh data HPL se-Provinsi Jawa Barat dengan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, untuk kegiatan aktualisasi ini Penulis akan merekap data di beberapa kantah saja dengan harapan kedepannya untuk keberlanjutan kegiatan dapat dilaksanakan rekapitulasi se-Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode ini. Maka dari itu dalam penulisan ini gagasan pemecah isu yang akan digunakan pada kegiatan aktualisasi ini yakni “*Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan Memanfaatkan Google Drive sebagai Penyedia Layanan Penyimpanan Data Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat*”, untuk rancangan kegiatannya akan lebih lanjut diuraikan pada sub-bab berikutnya.

D. RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI

RANCANGAN AKTUALISASI

Nilai-Nilai Dasar, Kedudukan, dan Peran PNS Untuk Mendukung Terwujudnya *Smart Governance*

Unit Kerja	: Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
Identifikasi Isu	: 1. Belum adanya fasilitas panduan persyaratan yang harus dilengkapi bagi Masyarakat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. 2. Belum optimalnya kualitas data Rekapitulasi Hak Pengelolaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat 3. Belum efektifnya penggunaan aplikasi <i>e-office</i> di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.
Isu yang Diangkat	: Belum optimalnya kualitas data Rekapitulasi Hak Pengelolaan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
Gagasan Pemecahan Isu	: Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan memanfaatkan <i>Google Drive</i> sebagai penyedia layanan penyimpanan data pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Membuat akun <i>Google Drive</i> sebagai website yang menyediakan layanan penyimpanan data untuk merekapitulasi data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	<ol style="list-style-type: none"> Konsultasi dengan mentor untuk mempergunakan akun <i>google drive</i> Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Menyusun folder perKantah Membuat link untuk memudahkan kantah mengakses atau mengupload data rekapitulasi 	<ol style="list-style-type: none"> Akun <i>google drive</i> yang sudah tersusun folder-folder sesuai wilayah Kantah Link untuk akses ke <i>google drive</i> 	<p>Tahapan Kegiatan 1: Kompeten Berkonsultasi untuk mendapatkan hasil kegiatan dengan kualitas terbaik</p> <p>Harmonis Berdiskusi dengan bahasa yang baik dan sopan untuk menciptakan suasana nyaman dan kondusif</p> <p>Kolaboratif Konsultasi dengan mentor untuk kelancaran kegiatan</p> <p>Tahapan Kegiatan 2: Berorientasi Pelayanan Memberi kemudahan bagi pengguna layanan khususnya Kantah-Kantah untuk dapat mengakses dan mengupload rekapitulasi HPL</p> <p>Akuntabel Membuat folder untuk memudahkan Kantah</p>	<p>Dengan dibuatnya akun <i>google drive</i> akan memudahkan kantah-kantah yang akan dimintakan data rekapitulasi HPL untuk mengakses dan mengupload data rekap. Sehingga berkontribusi pada:</p> <p>Visi Organisasi untuk “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan</p>	<p>Dengan adanya dibuatnya akun <i>google drive</i> dapat menguatkan nilai atr/bpn untuk Mewujudkan nilai Melayani yaitu memberikan pelayanan publik yang maksimal bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada setiap pemangku kepentingan</p>

				<p>mengupload data rekapitulasi sesuai kategori wilayah yang dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>Kompeten Mempelajari fitur dalam <i>google drive</i> agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan maksimal</p> <p>Tahapan Kegiatan 3: Berorientasi Pelayanan Untuk mendukung program pemerintah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan memberi kemudahan kepada kintah untuk dapat mengakses dan mendapatkan data HPL</p> <p>Kompeten Membuat folder yang memudahkan kintah mengumpulkan data sehingga dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Adaptif Memanfaatkan teknologi</p>	<p>Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman di era digital ini dengan membuat link yang dapat mempermudah satker mengakses data.		
2	Berkoordinasi dengan Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor terkait dengan rencana kegiatan untuk berkoordinasi dengan kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung 2. Membuat format surat permintaan data HPL untuk keperluan rekapitulasi di Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung 3. Mengirimkan Surat kepada Kantah Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Bukti kegiatan konsultasi dengan mentor 2. Surat permintaan rekap data HPL kepada Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung 	<p>Tahapan Kegiatan 1: Kompeten Konsultasi diharapkan dapat meningkatkan output dari kegiatan.</p> <p>Harmonis Berdiskusi dengan mentor dengan Bahasa yang baik dan sopan untuk menciptakan suasana yang kondusif</p> <p>Kolaboratif Dalam melaksanakan kegiatan dimulai dengan meminta saran mentor</p> <p>Tahapan Kegiatan 2: Akuntabel Membuat surat dengan cermat dan bahasa yang baik dan benar sehingga isi surat dan pelaksanaannya dapat</p>	Dengan dibuatnya surat permohonan yang ditujukan kepada kantah agar dapat berkoordinasi dengan baik dan menghasilkan data yang lebih berkualitas sehingga berkontribusi pada: Visi Organisasi untuk “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan	Berkoordinasi dengan kantah untuk meningkatkan hasil kegiatan dapat Mewujudkan Sikap Profesional bahwa dalam bekerja mengutamakan kolaborasi dan bersikap terbuka untuk menghasilkan nilai tambah

		Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung		<p>dipertanggungjawabkan</p> <p>Loyal Membuat surat secara formal untuk dapat berkoordinasi dengan kantah sesuai dengan format dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Kolaboratif Berkoordinasi dengan kantah-kantah untuk mendapatkan data rekapitulasi HPL yang berkualitas</p> <p>Tahapan Kegiatan 3: Berorientasi Pelayanan Mengirimkan surat kepada kantah-kantah untuk mendapatkan data yang berkualitas demi Mewujudkan pelayanan publik yang prima</p> <p>Akuntabel Mengirimkan surat baik secara daring maupun secara langsung agar dapat dengan cepat dan tepat</p>	<p>Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”</p>	
--	--	--------------------------------------	--	---	--	--

				<p>waktu dalam memperoleh data sehingga dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Harmonis Menjalin hubungan baik dengan Kantah-kantah agar mempermudah koordinasi pada saat melaksanakan kegiatan rekapitulasi maupun untuk kegiatan-kegiatan kedepannya.</p> <p>Kolaboratif Bekerjasama dengan Kantah-kantah untuk mendapatkan hasil kegiatan rekapitulasi HPL yang berkualitas</p>		
3	Merekap HPL di Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkonsultasi dengan mentor terkait proses rekap data HPL 2. Membuat daftar perdaerah Kantah dengan mengurutkan berdasarkan nomor sertipikat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto bukti kegiatan konsultasi dengan mentor 2. Hasil Rekapitulasi HPL yang dikirim oleh Kantah 	<p>Tahapan Kegiatan 1: Kompeten Konsultasi dengan mentor diharapkan dapat meningkatkan hasil atau kualitas output dari kegiatan.</p> <p>Harmonis Berbicara dengan baik dan sopan untuk menciptakan suasana dan lingkungan</p>	Dengan dibuatnya rekapitulasi HPL dengan data yang lebih berkualitas dari sebelumnya akan memberi kontribusi pada: Visi Organisasi	Hasil rekapitulasi data HPL yang lebih berkualitas dapat menguatkan Nilai ATR/BPN untuk mewujudkan nilai

		<p>3. Membuat rekapitulasi HPL</p>		<p>kerja yang kondusif</p> <p>Kolaboratif Dalam melaksanakan kegiatan dimulai dengan meminta saran dari mentor</p> <p>Tahapan Kegiatan 2: Akuntabel Membuat data sesuai format yang telah ditentukan secara sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya</p> <p>Kompeten Menghasilkan data yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat untuk sasaran akhir kegiatan yaitu inventarisasi data HPL dan laporan kegiatan pertanahan khususnya HPL untuk meningkatkan output pelayanan</p> <p>Tahapan Kegiatan 3: Akuntabel Menghasilkan data</p>	<p>untuk</p> <p>“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”</p> <p>Misi Organisasi menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang</p>	<p>Profesional dengan bekerja sama, bekerja cerdas demi menghasilkan nilai tambah</p>
--	--	------------------------------------	--	--	---	--

				<p>rekapitulasi HPL yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya</p> <p>Kompeten Kualitas Data HPL yang baik dan tidak asal-asalan sesuai dengan data yang dikirim oleh Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung</p> <p>Kolaboratif Membuat rekapitulasi berdasarkan hasil koordinasi dengan kantah-kantah yang dimintakan data HPL</p>	yang Berstandar Dunia	
4	Membandingkan data rekap HPL yang dikirimkan oleh Kantah dengan data HPL dalam KKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyandingkan data rekap HPL yang dikirim kantah dan data rekap HPL yang terdapat di KKP 2. Merinci data HPL dalam rekapitulasi yang dikirim kantah yang belum di input ke KKP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto bukti kegiatan 2. Rincian data HPL yang belum di input di KKP 3. Rincian data HPL pada KKP yang tidak sesuai dengan data Rekapitulasi HPL dari 	<p>Tahapan Kegiatan 1: Akuntabel Analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan data KKP dan data yang dikirimkan kantah</p> <p>Kompeten Menyandingkan data HPL pada KKP dan data yang dikirim Kantah untuk saling melengkapi kekurangan sehingga</p>	Dengan menyandingkan antara data yang ada dan data yang baru kemudian dibuat rincian kekurangan data HPL akan menghasilkan rekapitulasi HPL yang lebih berkualitas	Rincian kekurangan data pada rekap yang dikirim oleh kantah atau KKP akan dapat saling melengkapi data rekapitulasi sehingga menguatkan

		<p>3. Merinci data HPL dalam KKP yang tidak sesuai dengan data rekap HPL yang dikirim oleh Kantah</p>	<p>Kantah</p>	<p>menghasilkan data yang lebih berkualitas</p> <p>Adaptif Pemahaman dalam mempergunakan sistem KKP sebagai teknologi masa kini Kementerian ATR/BPN yang salah satu manfaatnya adalah untuk pendataan kegiatan pertanahan salah satunya HPL</p> <p>Tahapan Kegiatan 2: Akuntabel Analisis data secara cermat dan teliti agar dapat menghasilkan output yang berkualitas sehingga dapat Mempertanggungjawabkan kebenaran data dari kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>Kompeten Melaksanakan kegiatan dengan kinerja terbaik diharapkan dapat meningkatkan output dari kegiatan.</p> <p>Tahapan Kegiatan 3: Akuntabel</p>	<p>sehingga berkontribusi pada:</p> <p>Misi Organisasi yaitu Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.</p>	<p>nilai ATR/BPN untuk Mewujudkan nilai Terpercaya Bahwa dalam bekerja harus berpikir, berperilaku dengan cara terbaik dan benar serta dapat dipercaya.</p>
--	--	---	---------------	--	---	--

				<p>Rincian data rekap HPL pada KKP yang tidak sesuai dengan data rekap yang dikirim kintah untuk mendapatkan data yang berkualitas sehingga dapat mempertanggungjawabkan output kegiatan</p> <p>Kompeten Berusaha untuk menghasilkan output kegiatan yang maksimal dengan kinerja terbaik</p>		
5	Membuat <i>Google forms</i> untuk melakukan pembaharuan atau updating data HPL dikemudian hari dan Panduan cara menggunakannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat <i>google forms</i> terkait pembaharuan data dikemudian hari yang dapat diajukan dari masing-masing kintah beserta update file yang mana format telah ditentukan sebelumnya 2. Membuat panduan untuk melakukan pembaharuan data dikemudian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Print Screen Google forms</i> 2. Panduan untuk mengakses dan melakukan pembaharuan atau updating data HPL 	<p>Tahapan Kegiatan 1: Akuntabel Sebagai bentuk Pertanggungjawaban dari masing-masing Kintah kepada Kanwil agar selalu memperbaharui data HPL dikemudian hari.</p> <p>Kompeten Mempelajari fungsi google forms dan memanfaatkannya untuk keberlanjutan kegiatan rekapitulasi HPL.</p> <p>Adaptif Memanfaatkan fitur Google</p>	Dengan membuat google forms beserta panduan menggunakannya untuk pembaharuan data dikemudian hari akan berkontribusi pada:	Membuat google forms untuk pembaharuan data dikemudian hari demi keberlanjutan kegiatan dapat menguatkan nilai ATR/BPN untuk Mewujudkan nilai Melayani agar memberikan pelayanan

		hari		<p>yang sangat bermanfaat di era digital ini untuk keberlanjutan kegiatan rekapitulasi yang memudahkan Kantah untuk selalu memperbaharui data HPL yang baru diterbitkan.</p> <p>Kolaboratif Bekerjasama dengan Kantah-kantah untuk mendapatkan hasil kegiatan yang maksimal</p> <p>Tahapan Kegiatan 2: Berorientasi Pelayanan Membuat panduan bagi kantah untuk memudahkan dalam memperbaharui dan menginput data HPL yang baru diterbitkan untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Akuntabel Bentuk pertanggungjawaban untuk kegiatan rekapitulasi yang berkelanjutan</p> <p>Kolaboratif</p>	<p>Penataan Ruang yang Berstandar Dunia..</p>	<p>publik yang maksimal memberikan kepuasan bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada setiap pemangku kepentingan</p>
--	--	------	--	---	---	--

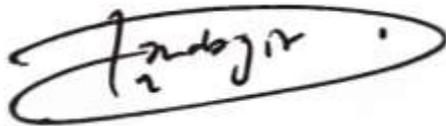
				Bekerja sama dengan kantah-kantah untuk selalu memperbaharui data saat ada HPL yang baru diterbitkan		
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 5 Matriks Rancangan Kegiatan

Bandung, 06 Juli 2022

Menyetujui,

Mentor,



Nandagia Darmadi, S.H., M.H.

NIP : 19760924 200312 1 003

Peserta Latsar,



Amalia Hardiani, S.H.

NIP : 19921115 202204 2 001

Berdasarkan Tabel 5 tersebut diatas, disusun rekapitulasi habituasi nilai-nilai Ber-AKHLAK, yaitu:

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Jumlah Penerapan/Habituasi Nilai Ber-AKHLAK						Jumlah	
		Berorientasi Pelayanan	Akuntabel	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif		Kolaboratif
1	Kegiatan 1								
	- Tahapan Kegiatan 1			1	1			1	3
	- Tahapan Kegiatan 2	1	1	1					3
	- Tahapan Kegiatan 3	1		1			1		3
2	Kegiatan 2								
	- Tahapan Kegiatan 1			1	1			1	3
	- Tahapan Kegiatan 2		1			1		1	3
	- Tahapan Kegiatan 3	1	1		1			1	4
3	Kegiatan 3								
	- Tahapan Kegiatan 1			1	1			1	3
	- Tahapan Kegiatan 2		1	1					2
	- Tahapan Kegiatan 3		1	1				1	3
4	Kegiatan 4								
	- Tahapan Kegiatan 1		1	1			1		3
	- Tahapan Kegiatan 2		1	1					2
	- Tahapan Kegiatan 3		1	1					2
5	Kegiatan 5								
	- Tahapan Kegiatan 1		1	1			1	1	4
	- Tahapan Kegiatan 2	1	1					1	3
Jumlah		4	10	11	4	1	3	8	41

Tabel 6 Matriks Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai-nilai Ber-AKHLAK

BAB III

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Role Model

Bahwa dalam melaksanakan tugas keseharian di satuan kerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dirasa telah mendapat banyak sekali pelajaran dan contoh sebagai sosok panutan dan/atau teladan yang senantiasa membimbing pada setiap kesulitan yang dihadapi dari sosok : *Nandagia Darmadi S.H., M.H.*



Gambar 8 Bapak Nandagia Darmadi, S.H., M.H.

Biodata

Nama	Nandagia Darmadi, S.H., M.H.
NIP	19760924 200312 1 003
Tanggal Lahir	24 September 1976
Alamat	Bojongmalaka Indah E1 No.14, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung

Jabatan	Penata Pertanahan Muda
Agama	Islam

Tabel 8 Biodata Role Model

Pada bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran ini beliau biasa dipanggil Bapak Gia, adalah Penata Pertanahan Muda yakni sebagai jabatan fungsional yang mana beliau adalah mentor penulis di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang juga banyak sekali memberi nilai-nilai pelajaran yang sangat amat bermanfaat sebagai bekal penulis dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan.

Beliau dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya selalu menjunjung nilai BerAKHLAK. Berorientasi Pelayanan, menjalankan tugas secara professional, mengabdikan kepada negara dan selalu mengutamakan pencapaian hasil serta mendorong kinerja pegawai agar selalu dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal. Akuntabilitas, selalu tuntas dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas keseharian. Kompeten, selalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan mau membantu setiap pegawai termasuk penulis untuk selalu meningkatkan kinerja. Harmonis, Beliau selalu bersikap ramah dan baik kepada semua Pegawai sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Loyal, berdedikasi dan selalu menjaga nama baik instansi. Adaptif selalu berusaha memberikan hasil yang terbaik dengan mencari terobosan-terobosan baru yang bisa digunakan guna menunjang produk akhir dari pelayanan yang lebih bermutu dan memuaskan publik. Kolaboratif, mentor merupakan sosok yang mudah untuk diajak berdiskusi dan selalu dapat memberikan saran yang baik kepada setiap pegawai agar dapat selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan maksimal.

Dari berbagai teladan tersebut diatas, Penulis merasa mendapatkan banyak sekali bekal yang bisa digunakan kelak ketika penulis sudah menjadi seorang PNS dan tentu tidak akan pernah

penulis abaikan nilai-nilai yang selalu ditanamkan pada diri penulis demi menjadi seorang Pelayan Publik yang mana merupakan salah satu officium nobile atau profesi luhur yang memiliki tugas dan fungsi yang mulia yakni melaksanakan pelayanan public dan senantiasa mau tidak mau harus menaruh kepentingan pribadi di bawah kepentingan publik.

B. Realisasi Aktualisasi

Realisasi kegiatan dilaksanakan setelah seminar judul dilaksanakan yakni pada tanggal 7 Juli 2022. Berdasarkan rancangan aktualisasi yang telah disusun dan disetujui oleh mentor dan coach Penulis juga telah menerima beberapa masukan dari penguji, maka core issue yang dilaksanakan dan dipaparkan yakni mengenai belum optimalnya kualitas data rekapitulasi Hak Pengelolaan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Kegiatan aktualisasi berdasarkan jadwal yang telah disusun pada Bab sebelumnya dimulai pada Tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 7 Agustus 2022.

Pada realisasinya, kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan telah melampaui rancangan aktualisasi yang telah penulis susun sebelumnya karena terdapat penambahan kegiatan sebanyak 2 kegiatan dari yang semula berjumlah 5 kegiatan menjadi 7 kegiatan.

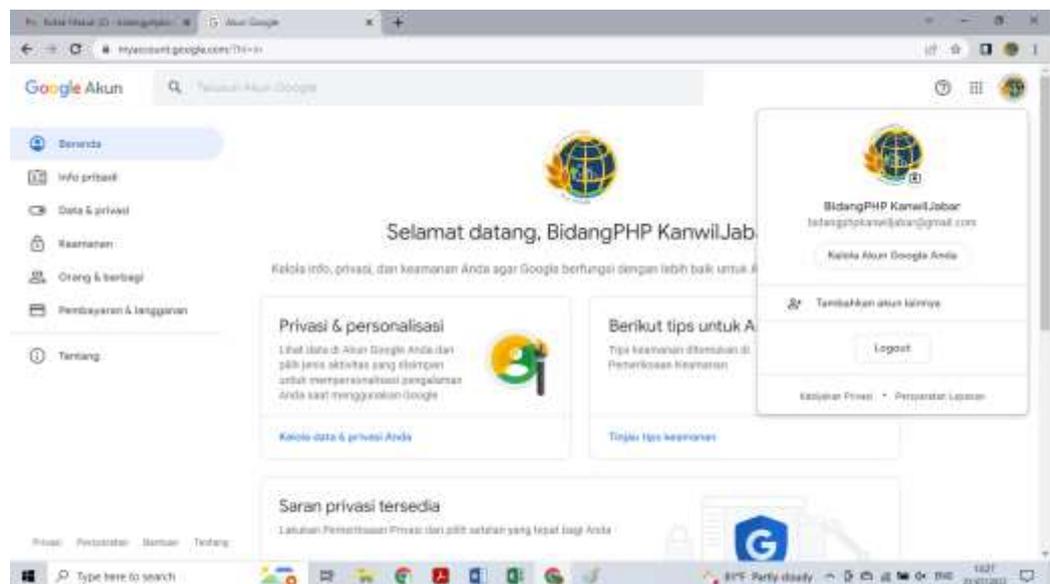
1. Realisasi Kegiatan

a. Membuat akun Google Drive sebagai website yang menyediakan layanan penyimpanan data untuk merekapitulasi data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

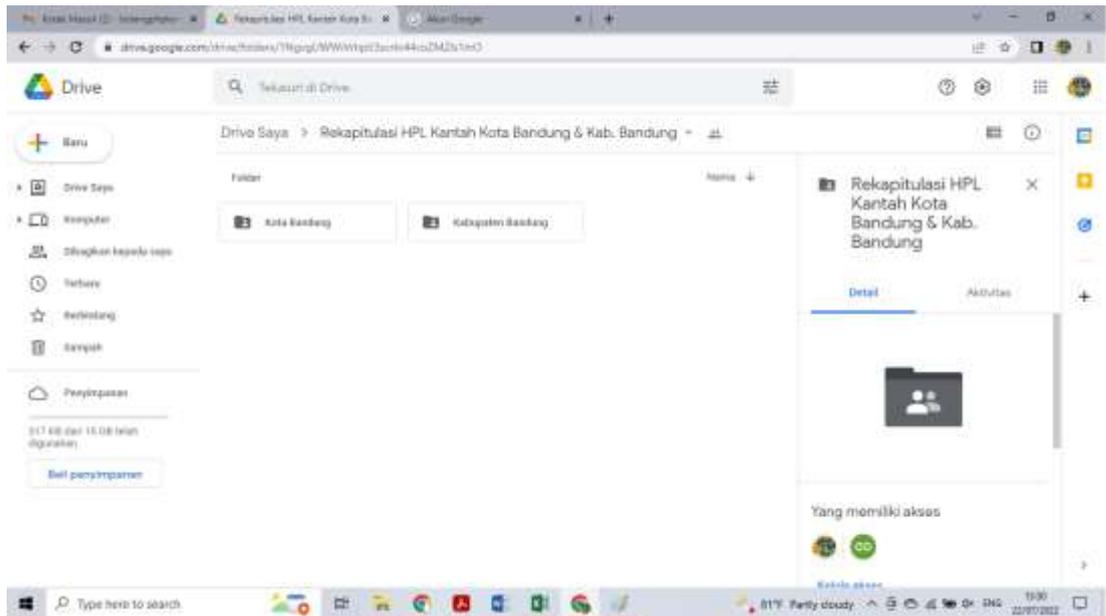
Kegiatan Pertama dari aktualisasi ini diawali dengan berkonsultasi dengan mentor untuk meminta masukan dan saran dengan tujuan menambah pengetahuan dan kompetensi penulis terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kegiatan menyusun folder perkantah pada google drive yang telah Penulis buat sebelumnya. Selanjutnya tahap kegiatan terakhir yaitu membuat link untuk

memudahkan kintah mengakses atau mengupload data rekapitulasi

Kegiatan pertama ini telah Penulis laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada rancangan aktualisasi yaitu pada tanggal 11 Juli 2022 dengan output berupa akun google drive untuk penyimpanan data rekapitulasi Hak Pengelolaan yang telah dibuat folder per-Kantah serta link untuk mengakses folder tersebut untuk memudahkan kintah dalam mengupload data rekap. Akun bidang yang dibuat dengan alamat email bidangphpkanwiljabar@gmail.com sedangkan untuk link nya yaitu <https://drive.google.com/drive/folders/1NgygUWWiVrhplJ3scrkr44coZMZls1mO>. Namun link tersebut agar tidak terlalu panjang, Penulis memanfaatkan website Bit.ly yang memberikan fasilitas untuk meringkas atau memperpendek link. Link yang dibuat dan akan dibagikan kepada kintah-kintah dan dimanfaatkan untuk penyimpanan data rekap HPL yaitu <https://bit.ly/3HS77Fp>.



Gambar 9 Akun Gmail Bidang PHP



Gambar 10 Folder Kantah pada Gdrive

b. Berkoordinasi dengan Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung

Dalam memulai setiap kegiatan Penulis tentunya meminta saran dari mentor apalagi kegiatan kali ini adalah berkoordinasi dengan kantah-kantah sehingga pastinya Penulis perlu banyak bertanya dan meminta saran kepada mentor mengenai apa saja yang harus dilakukan dan diperlukan. Selanjutnya membuat format surat permintaan data HPL untuk keperluan rekapitulasi di Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung serta mengirimkan surat tersebut ke Kantah yang dimaksud.

Kegiatan kedua ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya pada rancangan aktualisasi pada tanggal 12 Juli 2022 sampai 15 Juli 2022. Output kegiatan ini yaitu berupa Surat Permintaan Data HPL kepada Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung yang mana format isi surat tersebut dibuat berdasarkan format surat yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Surat tersebut dibuat dengan bahasa yang baik dan

benar atas saran mentor dan telah di setujui oleh atasan dengan nomor surat yakni AT.01.03/1444-32.300/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022. Surat yang telah disetujui menerangkan sebagai berikut

“Bahwa dalam rangka keperluan rekapitulasi dan updating Data Hak Pengelolaan di Provinsi Jawa Barat, bersama ini mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan data Hak Pengelolaan yang berlaku di wilayah kerja Saudara sesuai format terlampir dan dibuat dalam dokumen excel kemudian mengunggahnya melalui link: <https://bit.ly/3HS77Fp>. Data tersebut paling lambat diterima oleh kami pada tanggal 15 Juli 2022. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.”

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Soekarno Hatta No. 686 Bandung Telp. (022) 7562057 email : jbar@bptn.go.id

Nomor : AT.01.03/1444-32.300/VII/2022 Bandung, 12 Juli 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permintaan data dalam rangka Rekapitulasi dan Updating data HPL

Yth.
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Di - Tempat

Bahwa dalam rangka keperluan rekapitulasi dan updating Data Hak Pengelolaan di Provinsi Jawa Barat, bersama ini mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan data Hak Pengelolaan yang berlaku di wilayah kerja Saudara sesuai format terlampir dan dibuat dalam dokumen excel kemudian mengunggahnya melalui link: <https://bit.ly/3HS77Fp>. Data tersebut paling lambat diterima oleh kami pada tanggal 15 Juli 2022.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

Megandi Gawan Salsarja, S.H.
NIP. 19670227 199403 1 003

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)

Rahayu, Pejabat, Tegasnya

Lampiran
HPL yang masih berlaku

No.	Nomor Surat/Keputusan	Tanggal Surat/Keputusan	Area	Luas	Revisi	Tanggal Revisi	Revisi	Peringkat	Uraian/Detail	Uraian/Detail
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Rahayu, Pejabat, Tegasnya

Gambar 11 Format Surat Permintaan Data HPL ke Kantah

c. Mengumpulkan data HPL di Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung

Kegiatan ketiga ini merupakan kegiatan tambahan atas saran mentor dan perlu untuk dilakukan untuk kelancaran dalam merekap data HPL yang berarti capaian kegiatan telah melampaui rancangan aktualisasi yang telah Penulis susun sebelumnya. Penambahan kegiatan ini sangat diperlukan mengingat sebelum melaksanakan kegiatan rekapitulasi tentunya perlu terlebih dahulu untuk mengumpulkan data tersebut secara lengkap baik bersumber dari KKP maupun dari data fisik berupa Buku Tanah.

Kegiatan ketiga ini diawali dengan mendata HPL di Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung yang datanya bersumber dari KKP. Kemudian membuat format surat tugas sehingga dapat mengumpulkan data HPL dari Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung yang bersumber dari data fisik berupa Buku Tanah Hak Pengelolaan sehingga data yang dikumpulkan merupakan data yang valid. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 sampai 19 Juli 2022, berbarengan dengan jadwal kegiatan sebelumnya karena untuk dapat mengumpulkan data di Kantah dan mengakses arsip pada kantah selain diperlukan surat permintaan data juga perlu membuat surat tugas.

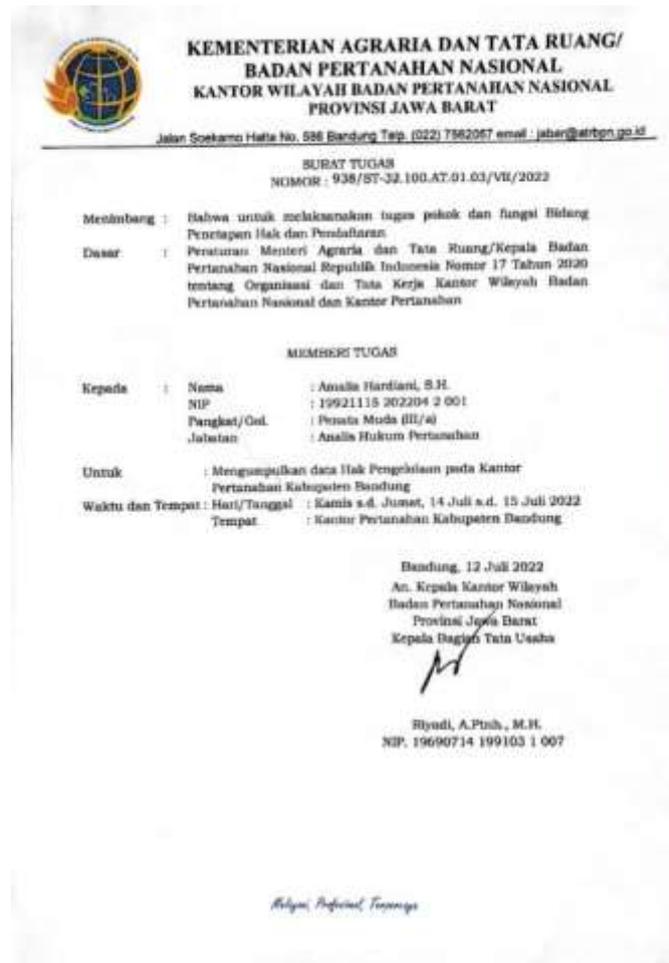
Surat tugas Penulis buat sesuai dengan format dalam Peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan nomor 937/ST-32.100.AT.01.03/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 dan segera setelah ditandatangani Penulis bertugas mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung. Di Kota Bandung Penulis hanya berhasil mengumpulkan data sebanyak 36 HPL berdasarkan buku tanah yang ada pada Arsip. Sisanya buku tanah tersebut sedang dalam proses SK sehingga Penulis tidak dapat mendata semua HPL. Oleh karena itu Penulis meminta bantuan kepada

Kantah untuk mengumpulkan kekurangan data dan menguploadnya ke link google drive.

Untuk Surat Tugas ke Kantah Kabupaten Bandung dengan tercantum dengan Nomor 938/ST-32.100.AT.01.03/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022. Penulis mengumpulkan data HPL di Kantah Kabupaten Bandung dengan membawa Surat Permohonan data HPL dan juga Surat Tugas yang telah Penulis buat. Di Kabupaten Bandung, Penulis hanya dapat mengumpulkan 2 data HPL dikarenakan buku tanah pada arsip kantah kabupaten bandung tidak tersusun rapi sehingga kantah kesulitan untuk menemukan buku tanah HPL dan juga terdapat beberapa HPL yang sedang dalam proses SK. Oleh karena itu untuk sisa data yang belum terkumpul, penulis juga meminta pihak kantah Kabupaten Bandung untuk melengkapi data dan menguploadnya pada link google drive dan data tersebut baru berhasil dikumpulkan pada tanggal 19 Juli 2022.

No	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat	Nama Pemegang Hak	NPK	Luas (m2)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor TSI	Tanggal Terbit SK
1	02 Mei 2001	02 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
2	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-08004	1.930			02000001	02 April 2001
3	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-01007	1.150			02000001	02 April 2001
4	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
5	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
6	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
7	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
8	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
9	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
10	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
11	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
12	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
13	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
14	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
15	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
16	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
17	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
18	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
19	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
20	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
21	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
22	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
23	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
24	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
25	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
26	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
27	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
28	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
29	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
30	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
31	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
32	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
33	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
34	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
35	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
36	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
37	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
38	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
39	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
40	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
41	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
42	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
43	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
44	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
45	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
46	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
47	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
48	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
49	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988
50	07 Mei 2001	07 Mei 2001	Pusat Perumahan	070000-04701	486,80	08-03441-031-000	28 Agustus 1988	02067001	02 Desember 1988

Gambar 12 Data HPL KKP Kantah Kota Bandung



Gambar 13 Surat Tugas ke Kantah Kabupaten Bandung

d. Merekap HPL di Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung

Kegiatan ini diawali dengan berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan rekapitulasi HPL Pada tanggal 19 Juli 2022, segera setelah data HPL yang berasal dari Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten terkumpul. Data HPL untuk Kota Bandung pada KKP berjumlah 62 Data HPL namun ternyata terdapat data HPL yang *double* sehingga data dari KKP tersebut sebenarnya berjumlah 61 Data, sedangkan data HPL berdasarkan buku tanah yang berhasil penuli kumpulkan adalah sebanyak 71 Data HPL. Kemudian untuk Kabupaten Bandung data HPL pada KKP maupun

pada buku tanah sama-sama berjumlah 23 Data HPL. Penulis membuat rekap data tersebut dalam 3 dokumen yaitu dokumen pertama berisi rekapitulasi HPL dari kantah Kota Bandung dalam format excel yang dimana sheet 1 berisi rekapitulasi dari KKP, kemudian untuk sheet 2 berisi rekapitulasi HPL yang dikirimkan oleh Kantah. Dokumen kedua berisi rekapitulasi HPL di Kabupaten Bandung dimana sheet 1 berisi data HPL dari KKP dan untuk sheet 2 berasal dari Buku Tanah, kemudian dokumen 3 berisi gabungan rekapitulasi HPL Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung yang kesemuanya diurutkan berdasarkan nomor sertipikat. Kegiatan ini selesai pada tanggal 22 Juli 2022 dan sesuai dengan jadwal aktualisasi yang telah Penulis rancang sebelumnya. Output dari kegiatan keempat aktualisasi ini yaitu rekapitulasi Hak Pengelolaan berdasarkan KKP dan juga Buku Tanah yang sudah tersusun secara sistematis berdasarkan Nomor Sertipikat.

No.	Momen Hak di KKP	Momen Berdasarkan SHM	Tanggal Terbit Sertipikat	Momen Pemegang Hak	Momen	Luas Tanah	Momen SH
1	1	1	11 Juni 1997	Perjanjian Pengalihan Hak Milik di Jakarta	01.0000.0000	480.000	01.00.01.0000.0000
2	1	1	08 November 1976	SP. Kawasan Agribisnis Perikanan di Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
3	1	1	03 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
4	1	1	01 Mei 2007	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
5	1	1	21 Februari 1998	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
6	1	1	10 Desember 1998	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
7	1	1	02 Desember 1998	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
8	1	1	04 Desember 1998	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
9	1	1	11 Mei 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
10	1	1	25 Agustus 1996	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
11	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
12	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
13	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
14	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
15	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
16	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
17	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
18	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
19	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
20	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
21	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
22	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
23	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000
24	1	1	02 Agustus 1997	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Kabupaten Bandung	01.0100.0000	1.000	01.01.01.0000.0000

Gambar 14 Merekap data HPL Kota Bandung

e. Meminta Data Kepada para Pemegang Hak Untuk Mengetahui Masih dikuasai atau Tidaknya HPL dan Penggunaannya Saat Ini

Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang disarankan oleh mentor untuk dilaksanakan dengan tujuan optimalisasi data HPL di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Sehingga kegiatan ini telah melampaui rancangan aktualisasi yang telah Penulis susun sebelumnya. Menurut mentor perlu untuk mengetahui apakah tanah yang telah terdata di Kantah Kota Bandung maupun Kantah Kabupaten Bandung masih dikuasai dan dipergunakan oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan ini telah Penulis laksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 sampai 23 Juli 2022 dimana Penulis selain merekap data HPL yang telah dikirimkan oleh Kantah Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung, juga membuat format surat untuk meminta data HPL kepada para Pemegang Hak untuk mengetahui apakah HPL yang mereka kuasai masih dipergunakan sesuai peruntukannya. Penulis membuat 5 surat permintaan data yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bandung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, PT. Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Perseroda) dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dimana setelah beberapa revisi konsep isi Surat yang telah disetujui salah satunya menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka keperluan rekapitulasi Data Hak Pengelolaan di Kota Bandung, bersama ini mohon kiranya Saudara dapat membantu untuk mengisi keterangan penguasaan dan pemanfaatan Hak Pengelolaan sesuai format terlampir pada link:

<https://bit.ly/3IR0uUo>, data tersebut paling lambat diterima oleh kami pada tanggal 25 Juli 2022.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.”

Surat tersebut intinya meminta pemegang hak untuk mengisi dan melengkapi data HPL pada file yang terdapat di *google drive* yang dapat diakses melalui link yang berbeda untuk masing-masing pemegang hak. Untuk PT. Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat dengan link <https://bit.ly/3IR0uUo>. Untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung <https://bit.ly/3yQF9ab>. Untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dengan link <https://bit.ly/3NLUBZi>. Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan link <https://bit.ly/3RCZnLX>. Untuk Perusahaan Umum Pembanguna Perumahan Nasional dengan link <https://bit.ly/3zfCxCG>.



Gambar 15 Surat Permintaan Data HPL kepada pemegang hak

Untuk pemegang hak atas nama PT. Bandung Infra Investama Penulis tidak mengirimkan surat dikarenakan

Penulis melakukan survey langsung ke alamat yang tertera pada Buku Tanah dimana saat ini tanah tersebut dipergunakan sebagai taman kota dengan nama Kiara Artha Park yang terletak di Jalan Jakarta, Kebon Waru, Kota Bandung. Tanah tersebut menurut hasil survey Penulis baik survey ke lapangan maupun dengan menelusuri melalui internet tanah tersebut dikerjasamakan dengan PT Mega Chandra Purabuana (MCP) untuk membangun taman Kiara Artha Park yang hingga saat ini masih dipergunakan.

Segera setelah surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh atasan, Penulis mempersiapkan surat tersebut untuk dikirim kepada pemegang hak. Surat tersebut penulis masukan ke amplop Kementerian ATR/BPN dan menuliskan alamat pemegang hak satu persatu dan mengirimkannya kepada Direktur Perusahaan Umum Perumnas yang ada di Jakarta Timur dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung di Soreang, Kabupaten Bandung via kurir JNE sedangkan untuk surat kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Bandung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dan Direktur PT. Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Jaswita) secara langsung ke kantor setempat yang letaknya tidak terlalu jauh dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tempat Penulis bekerja.

Output dari kegiatan kelima aktualisasi ini yaitu berupa Surat Permintaan HPL kepada pemegang hak dan juga hasil optimalisasi rekapitulasi berupa rincian data tentang masih dikuasai atau tidaknya bidang tanah dan penggunaannya saat ini yang mana ternyata dari kelima pemegang hak yang penulis kirimkan surat hanya 3 pemegang hak yang mengirimkan datanya.

f. Membandingkan data rekap HPL yang dikirimkan oleh Kantah dengan data HPL dalam KKP

Kegiatan keenam ini bertujuan untuk mengetahui data Hak Pengelolaan hasil rekap berdasarkan Buku Tanah yang dikumpulkan oleh Penulis dan Kantah, yang tidak sesuai atau belum diinput pada KKP. Untuk kemudian diinfokan kepada Kantah yang bersangkutan agar segera melengkapi data pada KKP sesuai dengan pendataan HPL berdasarkan buku tanah pada arsip. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal aktualisasi yang telah Penulis rancang sebelumnya pada rancangan aktualisasi yaitu pada tanggal 25 Juli 2022 sampai 29 Juli 2022.

Penulis lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu membandingkan data rekap HPL yang dikirimkan oleh Kantah dengan data HPL dalam KKP untuk kemudian di rinci data mana saja yang terdapat dalam data rekap yang belum di input ke KKP dan data mana saja pada KKP yang tidak sesuai dengan data rekap HPL dimana untuk Kota Bandung Penulis telah menemukan 10 data rekap HPL yang belum diinput ke KKP, sementara untuk Kabupaten Bandung Kantah telah menginput semua data HPL namun ada beberapa rincian data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan berdasarkan data yang dikirimkan oleh pemegang hak. Sementara untuk optimalisasi data HPL, Penulis telah menambahkan rincian data berupa peruntukan tanah berdasarkan sertipikat, rincian data mengenai masih dikuasai atau tidaknya HPL dan rincian mengenai penggunaan HPL pada saat ini berdasarkan data yang dikirimkan oleh pemegang hak yang mana rincian data ini tidak ada dalam KKP. Kegiatan ini baru selesai Penulis kerjakan pada tanggal 29 Juli 2022.

Kegiatan ini Penulis kerjakan dari tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 mengingat perlu ketelitian dalam merinci data yang belum diinput ke KKP. Dari hasil analisis Penulis secara cermat dan teliti, Penulis berhasil menemukan beberapa data yang belum di input. Rinciannya yaitu:

HPL Kota Bandung

- Terdapat 1 bidang HPL yang diinput oleh kantah sebanyak 2 kali sehingga terdapat double data yaitu untuk sertipikat HPL dengan nomor 19 dengan tanggal terbit sertipikat 8 desember 2006
- Terdapat 10 sertipikat HPL yang belum diinput kantah ke KKP yaitu:
 - HPL Nomor 1/ Cibuntu, terbit tanggal 06 Agustus 1987, pemegang hak Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) berkedudukan di Jakarta
 - HPL Nomor 1/Sukaasih, terbit tanggal 30 Maret 1991, pemegang hak Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) berkedudukan di Jakarta
 - HPL Nomor 7/Pungkur, terbit tanggal 26 Agustus 2002, pemegang hak Pemerintah Kota Bandung
 - HPL Nomor 1/Cihapit, terbit tanggal 23 Agustus 1994, pemegang hak Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kerta Wisata
 - HPL Nomor 1/Cijagra, terbit tanggal 28 Desember 1983, pemegang hak Direktorat Metrologie (Departemen Perdagangan)
 - HPL Nomor 1/Cipaganti, terbit tanggal 26 Januari 1985 pemegang hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
 - HPL Nomor 1/Citarum, terbit tanggal 21 Juni 1989, pemegang hak Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
 - HPL Nomor 1/Tamansari, terbit tanggal 12 Desember 1994, pemegang hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

- HPL Nomor 1/Turangga, terbit tanggal 05 September 1994, pemegang hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
 - HPL Nomor 1/Kepon Jeruk, terbit tanggal 28 Juni 1988, pemegang hak Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Berkedudukan di Bandung
- Terdapat 2 Nama Pemegang Hak yang belum diinput, yaitu:
- Sertipikat Nomor 1 (No. KKP 1) Terbit 05 November 2014 nama Pemegang Haknya adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 - Sertipikat Nomor 1 (No. KKP 1) Terbit 03 Agustus 2016 nama Pemegang Haknya yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Terdapat 28 Nomor SK belum diinput yaitu:
- Nomor SK 140/HPL/BPN/1993 untuk sertipikat Nomor 1 (No.KKP 3)
 - Nomor SK 7/HPL/DA/88 untuk sertipikat Nomor 3 (No. KKP 8)
 - Nomor SK 142/HPL/BPN/1993 untuk sertipikat Nomor 4 (No. KKP 9)
 - Nomor SK 96/HPL/DA/1986, Untuk sertipikat Nomor 5 (No. KKP 10)
 - Nomor SK 70/HPL/DA/1985, Untuk sertipikat Nomor 1 (No.KKP 12)
 - Nomor SK 5/HPL/DA/79 Untuk sertipikat Nomor 1 (No.KKP 15)
 - Nomor SK 35/HPL/BPN/2006, Untuk sertipikat Nomor 11 (No. KKP 19)
 - Nomor SK 164/HPL/BPN/1989, untuk sertipikat Nomor 1 (No.KKP 11)

- Nomor SK 21/HPL/BPN/1990, untuk Sertipikat Nomor 1 (No.KKP 24)
- Nomor SK 141/HPL/BPN/1993, untuk Sertipikat Nomor 2 (No.KKP 25)
- Nomor SK 123/HPL/DA/1986, untuk Sertipikat Nomor 1 (No.KKP 26)
- Nomor SK 142/HPL/BPN/1992, untuk Sertipikat Nomor 5 (No.KKP 30)
- Nomor SK 37/HPL/DA/88, untuk Sertipikat Nomor 1 (No.KKP 35)
- Nomor SK 54/HPL/BPN/1990, untuk Sertipikat Nomor 1 (No.KKP 36)
- Nomor SK 45/HPL/KEM-ATR/BPN/VI/2021, untuk Sertipikat Nomor 59
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 60
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 61
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 62
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 63
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 64
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 65
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 66
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 67
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 68

- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 69
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 70
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021, untuk Sertipikat Nomor 71
- Nomor SK 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2022, untuk Sertipikat Nomor 72
- Terdapat 14 Tanggal SK Belum diinput ke KKP, yaitu:
 - Tanggal terbit SK 01 Juli 2021, untuk Sertipikat Nomor 59
 - Tanggal terbit SK 24 Desember 2021, untuk Sertipikat Nomor 60 s.d. Nomor 72
- Terdapat 5 Tanggal Surat Ukur belum diinput ke KKP, diantaranya:
 - Tanggal SU 01 September 1986, untuk Sertipikat Nomor 1 (No.KKP 12)
 - Tanggal SU 25 Oktober 1989, untuk Sertipikat Nomor 1 (No.KKP 32)
 - Tanggal SU 15 Agustus 1990, untuk Sertipikat Nomor 1 (No. KKP 36)
 - Tanggal SU 19 Agustus 1985, untuk Sertipikat Nomor 1 (No. KKP 42)
 - Tanggal SU 06 Januari 1986, untuk Sertipikat Nomor 2 (No.KKP 53)

Untuk data HPL di Kabupaten Bandung tidak terdapat data pada buku tanah yang belum diinput ke KKP.

Selain data tersebut diatas, dari hasil analisis Penulis secara cermat dan teliti, Penulis juga berhasil menemukan beberapa data yang tidak sesuai dengan data rekap. Rinciannya yaitu:

HPL Kota Bandung

- Terdapat 2 Tanggal terbit yang tidak sesuai yaitu:
 - Tanggal terbit 11 Juni 1987, pada kkp tertanggal 26 Mei 1987, untuk Nomor Sertipikat 1 (No. KKP 1)
 - Tanggal terbit 11 Juli 1992, pada kkp tertanggal 20 Oktober 2017, untuk Sertipikat Nomor 1 (No.KKP 55)
- Terdapat 1 NIB yang tidak sesuai dengan Buku Tanah yaitu Nomor 10150000.04716 yang seharusnya bernomor 10.15.11.04.00815, untuk Sertipikat Nomor 10 (No.KKP 4)
- Terdapat 1 Nomor SK yang tidak sesuai yaitu Nomor SK 12/HGB/BPN-10.15/2017 dimana pada buku tanah tercantum 10/HPL/DL/80/A/31 untuk Sertipikat Nomor 1 (No.KKP 17)
- Terdapat 1 Tanggal SK yang tidak sesuai yaitu 28 Agustus 1986 yang seharusnya tertanggal 21 Agustus 1986, untuk sertipikat nomor 1 (No.KKP 1)
- Terdapat 1 Nomor Surat Ukur yang tidak sesuai dengan Buku Tanah yaitu 00055/2017 yang seharusnya bernomor 609/1990, untuk sertipikat nomor 1 (No.KKP 55)
- Terdapat 1 Tanggal Surat Ukur yang tidak sesuai dengan data KKP yaitu tanggal 01 September 1986 yang seharusnya tertanggal 2 Mei 1987, untuk sertipikat nomor 1 (No.KKP 1) pemegang hak Perum Perumnas.

HPL Kabupaten Bandung

- Terdapat 9 data luas tanah yang tidak sesuai dengan data rekap yaitu:
 - Luas tanah 271.375 seharusnya luas 267.542 m², untuk sertipikat nomor 3
 - Luas tanah 18.222 m² untuk sertipikat nomor 2
 - Luas tanah 5.850 seharusnya 5380 m² untuk sertipikat nomor 21

- Luas tanah 1.712 m² seharusnya 1.564 m² untuk sertipikat nomor 22
- Luas tanah 12.109 m² seharusnya 10.380 m² untuk sertipikat nomor 23
- Luas tanah 4.780 m² seharusnya 3.878 m² untuk sertipikat nomor 24
- Luas tanah 3.016 seharusnya 1.630 m² untuk sertipikat nomor 27
- Luas tanah 7.145 seharusnya 1.108 m² untuk sertipikat nomor 28
- Luas tanah 3.473 seharusnya 3.026 m² untuk sertipikat nomor 29

g. Membuat Google forms untuk melakukan pembaharuan atau updating data HPL dikemudian hari dan Panduan cara menggunakannya.

Kegiatan ini Penulis laksanakan dari yang semula direncanakan untuk dilaksanakan dalam waktu 2 hari yaitu tanggal 30 dan 31 Juli 2022 menjadi hanya satu hari saja yaitu tanggal 30 Juli 2022 oleh karenanya kegiatan ini diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis telah memanfaatkan fitur korespondensi google forms pada website google yang dapat dimanfaatkan untuk menginput data HPL dikemudian hari baik untuk menginput data HPL yang baru diterbitkan maupun data HPL yang baru dilakukan pemeliharaan data. Kegiatan ini dapat memudahkan Kantah-kantah untuk mengupdate data HPL dan membantu Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan data HPL yang lengkap dan aktual.

Google Forms ini berisi form atau data yang harus diisi yang kemudian hasil korespondensi yang dikirim Kantah akan Penulis cantumkan pada rekapitulasi HPL di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Data tersebut diantaranya:

- Wilayah
- Nama pegawai yang menginput data
- Perubahan data/ HPL baru terbit
- Jika perubahan sebutkan data yang dirubah
- Nomor Sertipikat
- Tanggal Sertipikat
- Nama Pemegang Hak
- NIB
- Nomor SK
- Tanggal SK
- Nomor SU
- Tanggal SU
- Peruntukan

The image shows a Google Forms interface for updating HPL data. The title is "Updating Data HPL". Below the title, there is a description: "Form untuk perbaharuan data atau updating data HPL dalam hal terdapat HPL baru yang diterbitkan atau perubahan data HPL". There is an "Email*" field with the placeholder "Alamat email valid" and a note: "Formulir ini mengumpulkan alamat email. Ubah sebelum". Below this is a dropdown menu for "Wilayah" with a "Pilihan ganda" icon. The options are:

- Kota Bandung
- Kabupaten Bandung
- Tambahkan opsi atau tambahkan "Lainnya"

 The form is displayed in a browser window with a Windows taskbar at the bottom showing the date 30/10/2022 and temperature 24°C.

Gambar 16 Google Forms

Selain membuat Google Forms, Penulis juga membuat panduan untuk kantar-kantar dapat memperbaharui data pada rekapitulasi HPL yang terdapat di *Google Drive* dengan memanfaatkan fitur *google forms* pada google. Selain itu google forms ini juga berisi langkah untuk dapat mengunduh

rekapitulasi HPL di satkernya agar dapat mengetahui jumlah atau data HPL di wilayahnya.

Untuk dapat memperbaharui data HPL dapat mengisi formulir *google forms* dengan mengakses link <https://bit.ly/3BtoYRN> dan mengisi data yang ingin diinput. Sedangkan untuk dapat mengunduh data rekap HPL di wilayah satkernya dapat mengunduh melalui link <https://bit.ly/3S6pPOh> untuk Kantah Kota Bandung, sedangkan untuk Kantah Kabupaten Bandung dapat mengunduh melalui link <https://bit.ly/3Bt4Hfe>. Sedangkan untuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sendiri telah dibuat link untuk dapat mengakses gabungan rekapitulasi Hak Pengelolaan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yaitu dengan mengakses link <https://bit.ly/Rekapitulasi-HPL-Jabar> .

Output dari kegiatan ini yaitu Google Forms dan juga Panduan untuk mengupdate data HPL dikemudian hari yang dapat dilakukan oleh Kantah Kota Bandung dan juga Kantah Kota Bandung. selanjutnya Penulis menambah tahapan kegiatan yaitu menginformasikan kepada Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung terkait hasil rekapitulasi serta panduan updating ini. Penulis sosialisasikan kepada Kantah dimaksud agar dapat ditindaklanjuti. Selain itu terdapat pula link berupa Scan QR untuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat agar dapat mengakses data Rekapitulasi HPL di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 17 Scan QR Rekapitulasi HPL

h. Menyusun Laporan Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dari tahap Aktualisasi yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 sesuai jadwal aktualisasi yang telah Penulis rancang. Kegiatan ini diawali dengan berkonsultasi dengan mentor terkait capaian-capaian yang telah dicapai dari output kegiatan. Selain itu juga terkait ada atau tidaknya kendala yang mana terdapat kendala dimana terdapat pemegang hak yang tidak mengirimkan data HPL kepada Penulis untuk mengoptimalkan hasil rekapitulasi HPL termasuk kendala keterbatasan waktu sehingga tidak memungkinkan bagi penulis untuk merekap data tersebut dari pemegang hak. Selain itu Penulis juga mengumpulkan semua bukti-bukti yang diperlukan untuk dicantumkan dalam laporan aktualisasi termasuk foto dan juga hasil rekapitulasi yang telah penulis kerjakan selama aktualisasi ini.

2. Aktualisasi Nilai-nilai Agenda/Mata Pelatihan

1. Membuat akun *Google Drive* sebagai website yang menyediakan layanan penyimpanan data untuk merekapitulasi data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

Kegiatan ini berkontribusi pada **Visi** Organisasi yaitu untuk Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta menguatkan nilai Organisasi **Melayani** yaitu memberikan pelayanan publik yang maksimal bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada setiap pemangku kepentingan. Penerapan nilai Ber-Akhlak diuraikan sebagai berikut:

a. Konsultasi dengan mentor untuk mempergunakan akun *google drive* Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

Pada tahapan pertama penulis telah menerapkan nilai berakhlak Akuntabel, Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif. **Akuntabel** karena Penulis telah membuat akun gmail atas nama bidang penetapan hak dan pendaftaran yang akan penulis gunakan secara bertanggung jawab tidak untuk disalahgunakan. Penulis berkonsultasi dengan mentor untuk meminta masukan dan saran dengan tujuan menambah pengetahuan dan kompetensi penulis terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bahasa yang baik dan sopan yang berarti pada tahap ini telah diterapkan nilai **Kompeten** karena dengan berkonsultasi untuk mendapatkan saran dan arahan akan menghasilkan output yang maksimal, **Harmonis** yaitu berkonsultasi dengan Bahasa yang baik dan benar serta sopan sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif dan **Kolaboratif** yaitu meminta saran dan bekerja sama dengan mentor.

b. Menyusun Folder Per-Kantah

Pada tahap ini telah diterapkan nilai **Berorientasi pelayanan** karena penyediaan google drive ini dapat memudahkan kintah mengupload data sesuai kategori, **Akuntabel** yaitu dapat mempertanggungjawabkan keamanan data yang terdapat pada google drive ini nantinya, **Kompeten** Mempelajari fitur dalam google drive agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan maksimal dan **Adaptif** yaitu memanfaatkan teknologi terkini yang menyediakan fasilitas kemudahan akses data HPL dimanapun dan kapanpun.

- c. Membuat link untuk memudahkan kintah mengakses atau mengupload data rekapitulasi

Pada tahap ini penulis menerapkan nilai **Berorientasi pelayanan** untuk mendukung program pemerintah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan memberi kemudahan kepada kintah untuk dapat mengakses dan mendapatkan data HPL, **Kompeten** yaitu dengan mempelajari cara-cara pembuatan link, dan **Adaptif** yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan akses data HPL.

2. Berkoordinasi dengan Kintah Kota Bandung, dan Kintah Kabupaten Bandung

Kegiatan ini berkontribusi pada **Visi** Organisasi yaitu untuk Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta menguatkan nilai Organisasi **Profesional** bahwa dalam bekerja mengutamakan kolaborasi dan bersikap terbuka untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk penerapan nilai berAkhlak diuraikan sebagai berikut:

- a. Konsultasi dengan mentor terkait dengan rencana kegiatan untuk berkoordinasi dengan kintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

Pada tahapan pertama ini penulis telah menerapkan nilai **Akuntabel** karena penulis telah melaksanakan aktualisasi ini berdasarkan saran dan masukan dari mentor untuk mendapatkan hasil terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan. **Kompeten** karena penulis berkonsultasi untuk menambah pengetahuan penulis mengenai kegiatan kedua aktualisasi ini. Penulis telah berkonsultasi dengan bahasa yang baik dan sopan kepada mentor sehingga penulis telah menerapkan nilai **Harmonis** serta menerapkan nilai **Kolaboratif** karena penulis dalam melaksanakan aktualisasi ini selalu didahului dengan meminta saran mentor agar aktualisasi yang penulis laksanakan mendapatkan hasil yang maksimal.

- b. Membuat format surat permintaan data HPL untuk keperluan rekapitulasi di Kintah Kota Bandung, dan Kintah Kabupaten Bandung

Pada tahap kedua ini Penulis telah menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** karena surat tersebut digunakan untuk dapat meminta data HPL yang sesuai dengan data fisik buku tanah agar lebih valid sehingga dapat menyediakan informasi pertanahan yang akurat dan aktual. **Akuntabel** yaitu membuat surat dengan cermat dan bahasa yang baik dan benar sehingga isi surat dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan, **Loyal** yaitu membuat surat secara formal untuk dapat dan **kolaboratif** dengan berkoordinasi dengan kintah-kintah untuk mendapatkan data rekapitulasi HPL yang berkualitas dengan membuat format surat permintaan HPL sesuai tata cara penulisan surat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri

ATR/KaBPN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

c. Mengirimkan Surat kepada Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung

Dengan dibuat dan dikirimkannya surat sebagaimana dijelaskan diatas kepada kantah kota bandung dan kabupaten bandung yang dimaksudkan agar dapat bekerja sama dalam mendata HPL yang valid, Penulis telah menerapkan nilai BerAKHLAK yaitu **Berorientasi Pelayanan** mengirimkan surat kepada kantah-kantah untuk mendapatkan data yang berkualitas demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, **Akuntabel** yaitu mengirimkan surat baik secara daring maupun secara langsung agar dapat dengan cepat dan tepat waktu dalam memperoleh data sehingga dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang akan dilaksanakan. **Harmonis** yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan Kantah-kantah agar mempermudah koordinasi pada saat melaksanakan kegiatan rekapitulasi maupun untuk kegiatan-kegiatan kedepannya. **Kolaboratif** yaitu bekerjasama dengan Kantah-kantah untuk mendapatkan hasil kegiatan rekapitulasi HPL yang berkualitas.

3. Mengumpulkan data HPL di Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung

Kegiatan ini berkontribusi pada **Visi** Organisasi yaitu untuk Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta menguatkan nilai Organisasi **Terpercaya** bahwa dalam bekerja harus berpikir, berperilaku dengan cara terbaik dan benar serta dapat dipercaya. Untuk penerapan nilai ber-Akhlak diuraikan sebagai berikut:

- a. Mendata HPL yang terdapat di KKP Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

Pada tahap kegiatan ini penulis telah menerapkan nilai Akuntabel dan adaptif. **Akuntabel** karena penulis telah mengumpulkan data HPL berdasarkan KKP dengan cermat dan teliti, tidak ada data yang terlewat sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan data kkp dan dapat dipertanggungjawabkan. **Kompeten** karena kualitas Data HPL yang baik dan tidak asal-asalan sesuai dengan data yang terdapat pada KKP Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung. **Loyal** karena penulis memanfaatkan data pada KKP tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain. **Adaptif** karena penulis telah memanfaatkan teknologi terkini yaitu Komputerisasi Kegiatan Pertanahan untuk mengambil data Hak Pengelolaan.

- b. Membuat format surat tugas untuk mengumpulkan data di Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung

Pada tahap kegiatan ini penulis telah menerapkan nilai berakhlak Akuntabel, Kompeten dan Loyal. **Akuntabel** karena format surat tugas ini dibuat berdasarkan format yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. **Kompeten** karena penulis telah mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas sebelum membuat Surat Tugas tersebut. **Loyal** karena penulis dalam membuat surat tugas dengan memperhatikan format surat tugas dalam peraturan perundang-undangan, **Kolaboratif** karena surat tugas tersebut merupakan perwujudan dari dukungan atasan untuk penulis dapat terlibat dalam pencapaian tujuan instansi.

- c. Mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung berdasarkan Buku Tanah yang ada di Arsip Kantah

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data HPL berdasarkan buku tanah yang terdapat pada arsip kantah dan dapat bekerjasama dengan baik dengan kantah kota bandung dan kabupaten bandung dengan menerapkan nilai Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif. **Akuntabel** karena data yang dikumpulkan bersumber dari data fisik dalam buku tanah sehingga data yang dihasilkan lebih valid. **Kompeten** karena penulis telah melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik untuk menghasilkan data HPL yang lengkap dan valid. **Harmonis** karena dalam pelaksanaannya penulis telah menjaga hubungan baik dan sopan pada saat meminta bantuan Kantah untuk meminta data dan mengumpulkannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. **Loyal** karena Penulis telah menjaga perilaku, berpakaian rapi serta sopan untuk menjaga nama baik satuan kerja pada saat berkunjung ke Kantah Kota Bandung maupun Kantah Kabupaten Bandung. **Kolaboratif** karena pengumpulan data ini merupakan hasil kerjasama dengan kantah agar menghasilkan data yang lengkap.

4. Merekap HPL di Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung

Kegiatan ini berkontribusi pada Visi dan Misi Organisasi yaitu untuk untuk menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, serta menguatkan nilai Organisasi **Profesional** dengan bekerja sama, bekerja cerdas demi menghasilkan nilai tambah. Untuk penerapan nilai ber-Akhlak diuraikan sebagai berikut:

- a. Berkonsultasi dengan mentor terkait proses rekap data HPL

Pada tahap ini Penulis telah menerapkan nilai Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif. **Kompeten** karena Penulis berkonsultasi dengan mentor dengan tujuan menambah wawasan penulis dan mencari informasi mengenai bagaimana kegiatan rekapitulasi ini harus dilaksanakan agar hasilnya maksimal. **Harmonis** karena penulis dalam berkonsultasi dengan mentor dengan Bahasa yang baik dan sopan agar menciptakan suasana nyaman dan kondusif. **Kolaboratif** karena penulis telah meminta saran dan masukan dari mentor.

- b. Membuat daftar perdaerah Kantah dengan mengurutkan berdasarkan nomor sertipikat

Pada tahap ini Penulis telah menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, akuntabel dan kompeten. **Berorientasi Pelayanan** karena penulis telah berupaya untuk menyediakan informasi yang aktual dan akurat mengenai penomoran sertipikat yang sesuai dengan data fisik pada buku tanah, **Akuntabel** karena Penulis membuat data rekapitulasi sesuai format yang telah ditentukan sebelumnya kemudian mengurutkannya secara sistematis berdasarkan nomor sertipikat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. **Kompeten** karena telah menghasilkan data yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat untuk sasaran akhir kegiatan yaitu inventarisasi data HPL dan laporan kegiatan pertanahan khususnya HPL untuk meningkatkan output pelayanan.

- c. Membuat rekapitulasi HPL

Pada tahap ini Penulis telah menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten dan Kolaboratif. **Berorientasi Pelayanan** karena penulis telah menyediakan informasi data Hak Pengelolaan yang aktual dan akurat sesuai dengan data fisik pada buku tanah, **Akuntabel** karena data yang telah direkap bersumber dari buku tanah yang diurutkan berdasarkan nomor sertipikat dan terjamin kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. **Kompeten** karena

kualitas Data HPL yang baik dan tidak asal-asalan sesuai dengan data yang terdapat pada buku tanah dan data yang dikirim oleh Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung. **Adaptif** karena penulis telah membuat hasil rekapitulasi HPL ini dengan memanfaatkan teknologi yaitu dibuat dengan menggunakan format excel kemudian memanfaatkan google drive untuk penyimpanan data. **Kolaboratif** karena data-data tersebut merupakan hasil kerja sama penulis dengan Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung.

5. Meminta Data Kepada para Pemegang Hak Untuk Mengetahui Masih dikuasai atau Tidaknya HPL dan Penggunaannya Saat Ini

Kegiatan ini berkontribusi pada **Visi** Organisasi yaitu untuk Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta menguatkan nilai organisasi **Terpercaya** dengan bekerja sama, bekerja cerdas demi menghasilkan nilai tambah.

- a. Membuat format surat permintaan data kepada para pemegang hak.

Penulis telah menerapkan nilai-nilai Ber-AKHLAK dalam melaksanakan tahap kegiatan ini yaitu **Akuntabel** karena surat permintaan data ini telah disahkan oleh atasan sebelum dikirim kepada pemegang hak sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, **Kompeten** karena penulis telah mempelajari terlebih dahulu peraturan tata naskah dinas sebelum membuat konsep surat tersebut , **Loyal** karena surat permintaan data ini telah dibuat dan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas dan **Adaptif** karena permintaan data ini

bertujuan untuk menambah rincian data mengenai penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah yang mana data tersebut belum pernah ada sebelumnya, termasuk pada KKP. **Kolaboratif** karena penulis membuat surat tersebut agar dapat bekerja sama dengan pemegang hak untuk mendapatkan data HPL yang lebih optimal.

- b. Membuat format tabel untuk diisi oleh Pemegang Hak terkait penggunaan HPL saat ini dan menguploadnya ke *Google Drive* untuk mempermudah Pemegang Hak mengisi data.

Kegiatan ini relevan dengan nilai berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel dan adaptif. **Berorientasi pelayanan** karena memudahkan pemangku kepentingan dalam mengisi data yang penulis perlukan agar tidak perlu membuat table dari awal. **Akuntabel**, karena table pengisian data tersebut bersumber dari data yang telah Penulis kumpulkan dari Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. **Adaptif** karena memanfaatkan teknologi terkini yaitu *google drive* untuk memudahkan akses data HPL tersebut. **Kolaboratif** karena penulis dalam melaksanakan tahap kegiatan ini memerlukan kerjasama yang baik dengan pemegang hak agar data yang didapat lengkap dan akurat.

- c. Menyiapkan Surat Permintaan data HPL dan mengirimkannya kepada pemegang hak

Penulis dalam tahap kegiatan ini telah menerapkan nilai berakhlak Akuntabel dan Kolaboratif. **Berorientasi Pelayanan** karena terdapat beberapa surat yang penulis kirimkan secara langsung kepada pemegang hak agar lebih cepat sampai di tujuan dan mendapatkan informasi lebih cepat, **Akuntabel** karena Penulis telah mengirimkan surat baik secara langsung maupun via ekspedisi ke alamat yang benar sesuai alamat yang bersangkutan. **Harmonis** karena pada saat penulis mengirimkan surat secara langsung kepada pemegang hak

penulis telah berinteraksi dengan sopan kepada pemegang hak demi menjaga hubungan baik dengan stakeholder. **Loyal** karena Penulis pada saat mengirimkan surat permintaan data secara langsung kepada pemegang hak dengan bahasa yang sopan, berpakaian rapi, dan tetap menjaga nama baik instansi. **Kolaboratif** karena dikirimkannya surat tersebut untuk tujuan agar Penulis dapat bekerjasama dengan pemegang hak untuk menghasilkan output data yang berkualitas.

6. Membandingkan data rekap HPL yang dikirimkan oleh Kantah dengan data HPL dalam KKP

Kegiatan ini berkontribusi pada **Misi** Organisasi yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia serta menguatkan nilai organisasi **Terpercaya** bahwa dalam bekerja harus berpikir, berperilaku dengan cara terbaik dan benar serta dapat dipercaya. Untuk penerapan nilai Ber-Akhlak diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyandingkan data rekap HPL yang dikirim kantah dan data rekap HPL yang terdapat di KKP.

Tahapan kegiatan yang pertama dari tiga kegiatan ini relevan dengan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten dan Adaptif. **Berorientasi Pelayanan** karena menyandingkan data tersebut bertujuan untuk mengetahui data mana yang belum lengkap atau tidak sesuai sehingga dapat menyajikan informasi data pertanahan yang lebih akurat dan aktual. **Akuntabel** karena penulis telah menganalisis data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan data KKP dan data yang dikirimkan kantah. **Kompeten** karena penulis telah menyandingkan data HPL pada KKP dan data yang dikirim Kantah untuk saling melengkapi kekurangan sehingga menghasilkan data yang lebih berkualitas. **Adaptif** karena Penulis berusaha untuk memahami dalam mempergunakan sistem KKP sebagai teknologi masa kini

Kementerian ATR/BPN yang salah satu manfaatnya adalah untuk pendataan kegiatan pertanahan salah satunya HPL. **Kolaboratif** karena data yang penulis bandingkan berasal dari data yang dikirimkan oleh kantah atau hasil koordinasi penulis dengan kantah kota bandung dan juga kantah kabupaten bandung

- b. Merinci data HPL dalam rekapitulasi yang dikirim kantah yang belum di input ke KKP

Pada tahap kegiatan ini penulis telah menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** karena Penulis telah berupaya untuk melakukan perbaikan tiada henti terhadap data-data HPL yang terdapat pada KKP dengan membuat rekapitulasi yang lebih lengkap. **Akuntabel** karena Penulis telah menganalisis data secara cermat dan teliti agar dapat menghasilkan output yang berkualitas sehingga dapat Mempertanggungjawabkan kebenaran data dari kegiatan yang dilaksanakan. **Kompeten** karena Penulis telah melaksanakan kegiatan dengan kinerja terbaik diharapkan dapat meningkatkan output dari kegiatan. **Kolaboratif** karena penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan tahap kegiatan ini tanpa bantuan data dari kantah kota bandung dan kantah kabupaten bandung.

- c. Merinci data HPL pada KKP yang tidak sesuai dengan data rekap berdasarkan Buku Tanah

Kegiatan ini memiliki relevansi dengan nilai berAKHLAK yaitu Akuntabel dan Kompeten. **Berorientasi Pelayanan** karena Penulis telah berupaya untuk melakukan perbaikan tiada henti terhadap data-data HPL yang terdapat pada KKP dan menyajikan data yang akurat serta aktual dengan merinci data pada KKP yang tidak sesuai dengan data fisik pada buku tanah. **Akuntabel** karena kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan rincian data rekap HPL pada KKP yang tidak sesuai dengan data rekap yang dikirim kantah untuk mendapatkan data yang berkualitas sehingga dapat

mempertanggungjawabkan output kegiatan. **Kompeten** karena penulis telah berusaha untuk menghasilkan output kegiatan yang maksimal dengan kinerja terbaik. **Kolaboratif** karena penulis tidak mungkin dapat merinci data tersebut tanpa koordinasi yang baik dengan kantah kota bandung dan kantah kabupaten bandung.

7. Membuat Google forms untuk melakukan pembaharuan atau updating data HPL dikemudian hari dan Panduan cara menggunakannya.

Kegiatan ini berkontribusi pada **Misi** Organisasi yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia serta menguatkan nilai organisasi **Melayani** agar memberikan pelayanan publik yang maksimal memberikan kepuasan bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada setiap pemangku kepentingan. Untuk penerapan nilai Berakhlak diuraikan sebagai berikut:

- a. Membuat *Google Forms* terkait pembaharuan data dikemudian hari yang dapat diajukan dari masing-masing kantah beserta update file yang mana format telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan tahap pertama ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Ber-AKHLAK yaitu Akuntabel, Kompeten, Adaptif, Kolaboratif. **Akuntabel** karena kegiatan ini untuk dapat mengumpulkan data yang valid, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. **Kompeten** karena bertujuan untuk menghasilkan data HPL yang berkualitas. **Adaptif** karena memanfaatkan teknologi terkini untuk memudahkan koordinasi dengan Kantah-kantah di Provinsi Jawa Barat, **kolaboratif** karena kegiatan ini tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada kerjasama dari kantah untuk melengkapi dan memperbaharui data HPL.

- b. Membuat panduan untuk melakukan pembaharuan data dikemudian hari.

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten dan Kolaboratif. **Berorientasi pelayanan** karena panduan ini agar memudahkan satker dalam memperbaharui data HPL sehingga dapat selalu menyajikan data HPL yang aktual sebagai salah satu bentuk perwujudan pelayanan public yang maksimal, **Akuntabel** karena dengan membuat panduan ini akan memudahkan satker menginput data dengan benar dan mudah untuk diperbaharui sehingga menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, **Kompeten** karena penulis telah mempelajari cara mendesain panduan yang menarik dan mudah dipahami. **Adaptif** karena penulis telah memanfaatkan aplikasi canva untuk mendesain panduan tersebut. **Kolaboratif** karena merupakan bentuk kerjasama yang baik antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan Kantah-kantah yang ada di Provinsi Jawa Barat.

- c. Memberikan informasi terkait hasil rekapitulasi dan panduan updating data HPL kepada Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai ber-akhlak. Pada tahapan ini penulis telah menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** karena hasil rekapitulasi yang penulis buat merupakan evaluasi terhadap rekap data HPL yang telah dicantumkan dalam KKP yang mana merupakan perwujudan dari tugas Penulis sebagai pelayanan publik. **Akuntabel** karena penulis telah membuat rekapitulasi HPL dengan sungguh-sungguh dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ketika menginformasikan kepada kantah hasil rekapitulasi HPL ini dapat penulis pertanggungjawabkan. **Kompeten** karena penulis telah mempelajari cara membuat QR untuk mempermudah satuan kerja penulis mengakses rekapitulasi hak pengelolaan yang telah penulis buat. **Adaptif** karena penulis telah menggunakan teknologi scan QR untuk

mempermudah akses rekapitulasi Hak Pengelolaan bagi satuan kerja penulis. **Loyal** karena informasi rekapitulasi ini hanya diberikan kepada kantah yang dimaksud dan tidak memberikan informasi data HPL antara kantah yang satu kepada kantah yang lain untuk tetap menjaga keamanan informasi. **Kolaboratif** karena dengan menginformasikan hasil rekapitulasi ini serta panduan untuk mengupdate data HPL dikemudian hari kepada kantah sebagai perwujudan kerjasama yang baik antara kantah dengan satuan kerja penulis.

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Jumlah Penerapan/Habitiasi Nilai Ber-AKHLAK													
		Berorientasi Pelayanan		Akuntabel		Kompeten		Harmonis		Loyal		Adaptif		Kolaboratif	
		Rancangan	Realisasi	Rancangan	Realisasi	Rancangan	Realisasi	Rancangan	Realisasi	Rancangan	Realisasi	Rancangan	Realisasi	Rancangan	Realisasi
1	Kegiatan 1														
	- Tahapan Kegiatan 1				1	1	1	1	1					1	1
	- Tahapan Kegiatan 2	1	1	1	1	1	1								
	- Tahapan Kegiatan 3	1	1			1	1					1	1		
2	Kegiatan 2														
	- Tahapan Kegiatan 1				1	1	1	1	1					1	1
	- Tahapan Kegiatan 2		1	1	1					1	1			1	1
	- Tahapan Kegiatan 3	1	1	1	1			1	1					1	1
3	Kegiatan 3														
	- Tahapan Kegiatan 1		1		1		1					1			
	- Tahapan Kegiatan 2				1		1				1				1
	- Tahapan Kegiatan 3				1		1		1		1				1
4	Kegiatan 4														
	- Tahapan Kegiatan 1					1	1	1	1					1	1
	- Tahapan Kegiatan 2		1	1	1	1	1								
	- Tahapan Kegiatan 3		1	1	1	1	1					1	1	1	1
5	Kegiatan 5														
	- Tahapan Kegiatan 1				1		1				1		1		1
	- Tahapan Kegiatan 2		1		1							1			1
	- Tahapan Kegiatan 3		1		1		1		1		1				1
6	Kegiatan 6														
	- Tahapan Kegiatan 1		1	1	1	1	1					1	1		1
	- Tahapan Kegiatan 2		1	1	1	1	1								1
	- Tahapan Kegiatan 3		1	1	1	1	1								1
7	Kegiatan 7														
	- Tahapan Kegiatan 1			1	1	1	1					1	1	1	1
	- Tahapan Kegiatan 2	1	1	1	1		1					1	1	1	1
	- Tahapan Kegiatan 3		1		1		1				1		1		1
Jumlah		4	14	10	19	11	18	4	6	1	6	3	9	8	17
Total		Rancangan: 41						Realisasi: 89							

Tabel 9 Matriks Rekapitulasi Realisasi Habitiasi Nilai-nilai Ber-AKHLAK

3. Manfaat Aktualisasi

Rekapitulasi HPL yang telah disusun dalam kegiatan aktualisasi Penulis, termasuk juga fitur Updating data HPL memanfaatkan *google forms* dan *google drive* meskipun belum difungsikan secara *massive* namun sudah cukup membawakan manfaat pada skala kecil.

Bagi Penulis sendiri, pelaksanaan aktualisasi ini sangat bermanfaat terutama dalam hal pengamalan nilai-nilai Ber-AKHLAK yang menjadikan Penulis lebih memahami bahwa dalam setiap melaksanakan tugas dan fungsi penulis sebagai analis hukum pertanahan harus selalu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK maupun Manajemen ASN dan Smart ASN. Selain itu dengan kegiatan aktualisasi ini mampu menambah pengetahuan penulis mengenai Hak Pengelolaan.

Kegiatan Aktualisasi ini juga bermanfaat bagi satuan kerja Penulis yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Untuk di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sendiri, rekapitulasi HPL ini meskipun hanya sebatas wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung namun data tersebut bermanfaat untuk inventarisasi data HPL dan kegiatan aktualisasi ini dapat juga digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi HPL untuk skala yang lebih besar yaitu untuk seluruh provinsi Jawa Barat. Berdasarkan testimoni dari ibu Indri yang merupakan rekan kerja penulis di bidang penetapan hak dan pendaftaran, hasil rekapitulasi yang telah penulis kerjakan sangat bermanfaat dan dapat dijadikan evaluasi bagi satker di lingkungan kanwil karena dapat diketahui data HPL mana saja yang belum diinput ke KKP serta data mana pada KKP yang belum sesuai dengan data pada buku tanah. Selain itu dapat diketahui juga penggunaan bidang tanahnya yang mana rincian tersebut tidak tercantum dalam KKP.

Rekapitulasi HPL ini memiliki manfaat juga bagi stakeholder yaitu kantor pertanahan yang terdapat di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat khususnya Kantor Pertanahan Kota Bandung

dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Dengan adanya rekapitulasi ini dapat memudahkan kantah dalam pencarian data jumlah hak pengelolaan baik di kota Bandung maupun Kabupaten Bandung serta pemanfaatan tanah tersebut pada saat ini. Rekapitulasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melengkapi data HPL yang belum lengkap di KKP. Hal tersebut dibuktikan dengan testimoni yang telah diberikan oleh Ibu Nora Harahap seorang staf di Kantor Pertanahan Kota Bandung dan juga Bapak Riki seorang staf pada bagian Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa Rekapitulasi HPL yang telah Penulis kerjakan bermanfaat bagi satuan kerja mereka.



Gambar 18 Testimoni Kantah Kota Bandung



Gambar 19 Testimoni Kantah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan aktualisasi ini membawa manfaat baik untuk penulis sendiri maupun Satuan Kerja yang dibuktikan berdasarkan testimoni pada gambar diatas.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi

Laporan aktualisasi ini dapat diselesaikan tentu dengan adanya faktor-faktor pendukung sebagai jalan bagi penulis untuk merampungkan laporan ini. Beberapa faktor pendukung tersebut diantaranya :

1. Dukungan dari Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Latsar merupakan salah satu kewajiban bagi CPNS guna menjadi pribadi yang lebih berintegritas dan dapat memajukan bangsa dan Negara yang mana dengan kata lain Latsar juga termasuk sebagai Tugas Negara. Oleh karena itu Bapak Kepala Bidang PHP selalu mengingatkan bahwa kegiatan Latsar harus ditempuh dengan suka dan memanfaatkan

kesempatan tersebut untuk mempelajari hal-hal baru yang kelak akan berguna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang PNS. Beliau juga mempermudah Penulis dalam berkoordinasi dengan Kantah-kantah dan para pemegang hak dengan memberikan persetujuan untuk mengirimkan Surat Permintaan Data HPL, oleh karena itu Penulis tidak mungkin dapat berkoordinasi dengan baik tanpa dukungan dari Kepala Bidang PHP.

2. Dukungan dari mentor yang secara proaktif tanpa lelah mendorong penulis untuk menyelesaikan aktualisasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, termasuk saran-saran juga ide-ide yang sangat bermanfaat untuk dituangkan dalam aktualisasi ini. Mentor juga selalu dapat diajak berdiskusi ketika penulis merasa kesulitan serta dapat memberikan solusi yang tepat dan dengan sabar menghadapi Penulis yang seringkali membutuhkan bantuan mentor. Mentor juga memotivasi agar Penulis selalu semangat dalam melaksanakan Aktualisasi ini.
3. Dukungan sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat diantaranya tersedianya komputer yang dibutuhkan oleh penulis karena dalam mengolah data-data terkadang membutuhkan lebih dari satu komputer. Kemudian, tersedianya printer dan scanner juga yang paling penting adalah jaringan internet yang cukup baik;
4. Kerja sama dari Kantor Pertanahan yang sangat mendukung kegiatan aktualisasi penulis oleh karena *output* dari kegiatan ini dapat digunakan pada kegiatan-kegiatan lainnya dikemudian hari;

Selain faktor pendukung pada pelaksanaan realisasi kegiatan aktualisasi ini juga ditemui beberapa faktor penghambat yakni :

1. Kantah yang lumayan membutuhkan banyak waktu dalam mengumpulkan Buku Tanah mengingat terlalu banyaknya buku tanah pada arsip kantah yang seringkali tidak tersusun rapi sehingga kesulitan dalam mencari buku tanah tersebut dengan

waktu yang terbatas ini, namun pada akhirnya Penulis tetap berhasil mengumpulkan data HPL dengan bantuan Kantah meskipun waktu pengumpulan data mundur dari yang telah dijadwalkan;

2. Terdapat Pemegang Hak yang tidak mengirimkan data HPL sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Penulis telah berupaya untuk mengirimkan surat permintaan data HPL kepada masing-masing pemegang Hak baik mengirimkannya langsung kepada pemegang hak maupun melalui jasa ekspedisi, namun sampai saat ini hanya ada tiga data HPL yang dikirimkan oleh para pemegang hak sehingga Penulis tidak dapat mencantumkan rincian data berupa Penguasaan tanah dan penggunaan tanah HPL saat ini secara keseluruhan namun cukup untuk dijadikan sample dan dapat pula dijadikan pedoman bagi Penulis untuk melaksanakan kegiatan rekapitulasi HPL se-Provinsi Jawa Barat kedepannya.

D. Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai-nilai dasar PNS yang diaktualisasi	Teknik Aktualisasi
1	<p>Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan memanfaatkan <i>Google Drive</i> sebagai penyedia layanan penyimpanan data se-Provinsi Jawa Barat</p> <p>a. Berkoordinasi dengan Kantah-Kantah di Provinsi Jawa Barat</p> <p>b. Mengumpulkan data Hak Pengelolaan yang ada di Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Barat baik dari KKP maupun dari Buku Tanah</p> <p>c. Merekap data HPL se-Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Meminta Data Kepada Pemegang Hak Untuk Mengetahui Masih Dikuasai atau Tidaknya HPL dan</p>	<p>1.1 Berorientasi Pelayanan</p> <p>1.2 Akuntabel</p> <p>1.3 Kompeten</p> <p>1.4 Harmonis</p> <p>1.5 Loyal</p> <p>1.6 Adaptif</p> <p>1.7 Kolaboratif</p>	<p>1.1 Dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada setiap satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengakses data HPL dengan tujuan untuk Pelayanan Publik yang berkualitas.</p> <p>1.2. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar dikemudian hari data-data yang tersimpan selalu aman dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kantah-kantah.</p> <p>1.3 Dilakukan dengan memperhatikan efektifitas juga realistis agar dapat digunakan secara internal kanwil minimal dan kantah-kantah maksimal.</p> <p>1.4 Menjaga hubungan baik dengan kantah-kantah agar dapat bekerjasama dengan baik untuk merekap data HPL di Provinsi Jawa Barat</p> <p>1.5 Dilaksanakan dengan mematuhi peraturan</p>

	<p>Penggunaannya Saat Ini</p> <p>e. Menyandingkan data HPL yang dikirimkan oleh kantah dengan data HPL pada KKP</p> <p>f. Mengubah format dalam <i>Google Forms</i> agar dapat digunakan oleh semua Kantah di Provinsi Jawa Barat untuk mengupdate data HPL</p> <p>g. Membuat Panduan Updating data HPL untuk tiap Kantah di Provinsi Jawa Barat</p>		<p>perundang-undangan yang berlaku</p> <p>1.6 Selalu berupaya untuk memahami teknologi terbaru yang dapat memudahkan akses data HPL baik bagi Kanwil maupun Kantah.</p> <p>1.7 Bekerja sama dengan Kantah-kantah untuk memaksimalkan pemanfaatan <i>google drive</i> terkait data HPL.</p>
2	<p>Memonitoring Updating data HPL yang dikirimkan kantah di provinsi jawa barat melalui pengisian <i>google forms</i> baik untuk penerbitan HPL baru maupun pemeliharaan data HPL setiap 2 minggu sekali</p> <p>a. Memantau hasil korespondensi <i>google forms</i> setiap 2 minggu sekali untuk mengetahui ada atau tidaknya HPL yang</p>	<p>1.1 Berorientasi Pelayanan</p> <p>1.2 Akuntabel</p> <p>1.3 Harmonis</p> <p>1.4 Loyal</p> <p>1.5 Adaptif</p> <p>1.6 Kolaboratif</p>	<p>1.1 Menjalankan peran ASN sebagai pelayan publik yang bukan hanya melayani masyarakat tapi juga pemangku kepentingan.</p> <p>1.2 Selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan kantah-kantah di lingkungan Kanwil Provinsi Jawa Barat dalam mengumpulkan data HPL.</p> <p>1.3 Dilaksanakan dengan sikap dan perilaku beretika untuk menciptakan hubungan baik dengan kantah-kantah di lingkungan kanwil BPN Provinsi Jawa Barat sehingga</p>

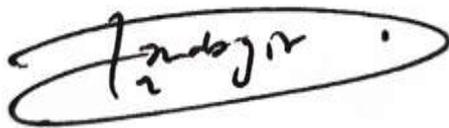
	<p>baru diterbitkan atau perubahan data HPL</p> <p>b. Menginput Updating data HPL ke dokumen rekapitulasi HPL pada <i>google drive</i> agar data HPL selalu aktual</p> <p>c. Mengkonfirmasi ulang hasil updating kepada kantah untuk memastikan data tersebut adalah valid</p> <p>d. Menyandingkan data HPL pada KKP dengan data rekapitulasi yang dikirim oleh Kantah</p>		<p>dapat mempermudah dalam meminta data kepada kantah tersebut.</p> <p>1.4 Dilaksanakan dengan etika yang baik untuk menjaga nama baik Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan menjaga kerahasiaan data pada <i>google drive</i>.</p> <p>1.5 Dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi terkini yaitu via media social untuk berkoordinasi dengan kantah-kantah sehingga memudahkan dalam berkomunikasi.</p> <p>1.6 Dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dengan kantah untuk menghasilkan data yang valid dan optimal.</p>
--	--	--	--

Tabel 10 Tindak Lanjut Aktualisasi

Bandung, 9 Agustus 2022

Menyetujui

Mentor,



Nandagia Darmadi, S.H., M.H.

NIP : 19760924 200312 1 003

Peserta Latsar



Amalia Hardiani, S.H.

NIP. 199211152022042001

Lembar Komitmen

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Amalia Hardiani, S.H.

NIP : 199211152022042001

Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor
Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat

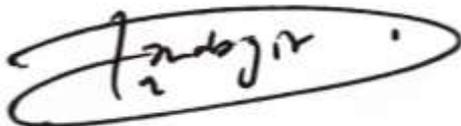
Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

Menyatakan bahwa :

1. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan X Tahun 2022
2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*.
3. Bertanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Nandagia Darmadi, S.H., M.H.

Bandung, 9 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Amalia Hardiani, S.H

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Isu yang diangkat Penulis dalam Laporan Aktualisasi ini yaitu belum optimalnya kualitas data Hak Pengelolaan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan gagasan alternative penyelesaian isu berupa Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan memanfaatkan *Google Drive* sebagai penyedia layanan penyimpanan data pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang telah penulis laksanakan selama 1 bulan lamanya sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022.

Kegiatan Aktualisasi ini Penulis batasi hanya membuat rekapitulasi di Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung dan telah berhasil Penulis kerjakan sebanyak 8 kegiatan, yang semula 5 kegiatan, karena terdapat 2 kegiatan tambahan yang berarti telah melampaui rancangan aktualisasi yang telah disusun sebelumnya. Kemudian terdapat 1 kegiatan untuk menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini ad beberapa kegiatan yang selesai namun tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hambatan Penulis saat mengerjakan aktualisasi ini yaitu pada saat meminta data HPL baik dari Kantah maupun dari Pemegang Hak, namun untuk data HPL dari Kantah telah berhasil dikumpulkan, sedangkan untuk data dari Pemegang Hak hanya 3 Pemegang Hak saja yang mengirimkan surat balasan dan mengisi data yang diperlukan oleh Penulis.

Dari kegiatan Aktualisasi ini, untuk kota Bandung, Penulis menemukan 10 data HPL yang didata berdasarkan Buku Tanah yang belum diinput pada KKP serta terdapat 8 rincian data HPL yang terdapat pada KKP yang tidak sesuai dengan data pada Buku Tanah. Untuk Kabupaten Bandung, tidak ada data HPL yang belum diinput namun ada 9 rincian data HPL pada buku tanah yang tidak sesuai dengan rincian data pada KKP. Selanjutnya Penulis menginfokan

kepada Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung mengenai hasil rekapitulasi HPL yang telah Penulis kerjakan.

Aktualisasi merupakan suatu simulasi bagi CPNS bahwa dalam melakukan segala tindakan baik yang berhubungan dengan jabatan maupun yang tidak berhubungan dengan jabatan Nilai Dasar PNS (Agenda I,II,III) adalah filter bagi seorang CPNS dan Nilai Organisasi yakni Melayani, Profesional, dan Terpercaya sebagai pegangan agar dalam melakukan segala tindakan tidak menjadi keliru, oleh karena perlu diingat PNS juga merupakan *officio nobile* oleh karena itu tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan. Maka dari itu aktualisasi ini layaknya latihan bagi CPNS untuk melaksanakan jabatan yang sesungguhnya kelak setelah menjadi PNS.

B. REKOMENDASI

Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penulis setelah realisasi aktualisasi ini adalah membuat rekapitulasi HPL dengan skala yang lebih luas yaitu se-provinsi Jawa Barat dan menyempurnakan manajemen dokumen yang telah dibuat oleh penulis mengingat masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan, supaya dikemudian hari dapat digunakan dengan baik oleh satuan kerja Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat maupun Kantah-Kantah dimana dalam pelaksanaannya Penulis berharap dapat terus mendapatkan dukungan dari Satuan Kerja dan juga Mentor.

Penulis berharap dapat terus berkonsultasi dengan Mentor, mendapatkan saran dan arahan yang bermanfaat agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan serta mendapat dukungan dari Kantah dan juga satuan kerja Penulis yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk memudahkan Penulis dalam berkoordinasi dengan Kantah-kantah dan pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi ini.

Kedepannya Penulis harap untuk Kantah-Kantah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dapat selalu kooperatif dan dapat bekerja sama

dengan baik untuk menghasilkan data rekapitulasi Hak Pengelolaan yang lebih berkualitas. Hal tersebut dapat lebih mudah terwujud apabila Kantah-Kantah tersebut dapat lebih tertib dan disiplin dalam menyusun Arsip Buku Tanah maupun warkah lainnya secara sistematis dan rapi sehingga tidak kesulitan pada saat mencari dokumen yang diperlukan serta selalu mengupdate data HPL baik pada KKP maupun pada rekapitulasi HPL pada *Google Drive* agar data yang tercantum benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini.

Penulis tentunya akan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan etos kerja yang lebih baik lagi mengingat setelah pelaksanaan aktualisasi ini penulis lebih memahami dan menghayati nilai-nilai dasar PNS yakni sesuai dengan Agenda I, Agenda II, dan Agenda III. Nilai dasar yang wajib untuk diimplementasikan terutama pada kegiatan tugas sehari-hari adalah nilai-nilai Ber-AKHLAK; Manajemen ASN; dan Smart ASN. Harapan penulis agar kedepannya nilai-nilai dasar tersebut bisa dipahami dan dihayati oleh seluruh pegawai khususnya di satuan kerja penulis umumnya di kementerian untuk mewujudkan etos kerja birokrasi yang minim kesalahan dan maksimal pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara;
2. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Analisis Isu Kontemporer;
3. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Kesiapsiagaan Bela Negara;
4. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Berorientasi Pelayanan;
5. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Akuntabel;
6. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Kompeten;
7. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Harmonis;
8. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Loyal;
9. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Adaptif;
10. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Kolaboratif;
11. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Smart ASN;
12. Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen ASN.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

Lampiran

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
NIP : 19921115 202204 2 001
Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum Optimalnya Kualitas Data Hak Pengelolaan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
Gagasan : Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan Memanfaatkan *Google Drive* Sebagai Penyedia Layanan Penyimpanan Data Pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Kegiatan 1: Membuat akun *Google Drive* sebagai website yang menyediakan layanan penyimpanan data untuk merekapitulasi data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dengan mentor untuk mempergunakan akun <i>google drive</i> Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran2. Membuat akun <i>google drive</i> dan menyusun folder perKantah3. Membuat link untuk memudahkan kantah mengakses atau mengupload data rekapitulasi <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akun <i>google drive</i>2. Link akun <i>google drive</i> <p>Keterkaitan</p> <p>Tahap pertama:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kompeten- Harmonis- Kolaboratif <p>Tahap Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none">- Berorientasi Pelayanan- Akuntabel- Kompeten- Adaptif		

<p>Tahap Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berorientasi Pelayanan - Kompeten - Adaptif <p>Kontribusi Visi Organisasi</p> <p>Penguatan Nilai Melayani</p>		
--	--	--

Kegiatan 2 : Berkoordinasi dengan Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor terkait dengan rencana kegiatan untuk berkoordinasi dengan kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung 2. Membuat format surat permintaan data HPL untuk keperluan rekapitulasi di Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung 3. Mengirimkan Surat kepada Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Bukti kegiatan konsultasi dengan mentor 2. Surat permintaan rekap data HPL kepada Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung <p>Keterkaitan</p> <p>Tahap pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompeten - Harmonis - Kolaboratif <p>Tahap Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Loyal - Kolaboratif <p>Tahap Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berorientasi Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelajari Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. - Perlu menambah kegiatan untuk membuat surat tugas dan mengumpulkan data HPL ke Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. 	

<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Harmonis - Kolaboratif <p>Kontribusi Visi Organisasi</p> <p>Penguatan Nilai Profesional</p>		
---	--	--

Kegiatan 3: Mengumpulkan Data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

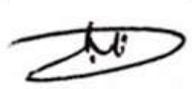
Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata HPL yang terdapat di KKP Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung 2. Membuat format surat tugas untuk mengumpulkan data di Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung 3. Mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung berdasarkan Buku Tanah yang ada di Arsip Kantah <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Bukti Kegiatan 2. Surat Tugas untuk mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung 3. Hasil pengumpulan data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung <p>Keterkaitan</p> <p>Tahap Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Adaptif <p>Tahap Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kompeten - Loyal <p>Tahap Ketiga:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penambahan kegiatan pada minggu ke-1 agar memperoleh data yang lebih valid. - Usahakan untuk mendapatkan data tentang masih digunakan atau tidaknya HPL dan pemanfaatan HPL untuk data yang lebih lengkap. 	

<ul style="list-style-type: none">- Akuntabel- Kompeten- Harmonis- Loyal- Kolaboratif <p>Kontribusi Misi Organisasi</p> <p>Penguatan Nilai Profesional</p>		
--	--	--

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
 NIP : 19921115 202204 2 001
 Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN
 Provinsi Jawa Barat
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Isu : Belum Optimalnya Kualitas Data Hak Pengelolaan di
 Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
 Gagasan : Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan
 Memanfaatkan *Google Drive* Sebagai Penyedia Layanan
 Penyimpanan Data Pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Kegiatan 4: Merekap HPL di Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkonsultasi dengan mentor terkait proses rekap data HPL 2. Membuat daftar perdaerah Kantah dengan mengurutkan berdasarkan nomor sertipikat 3. Membuat rekapitulasi HPL <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Bukti Kegiatan 2. Hasil rekapitulasi HPL kintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung <p>Keterkaitan</p> <p>Tahap Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompeten - Harmonis - Kolaboratif <p>Tahap Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kompeten <p>Tahap Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kompeten - Kolaboratif <p>Kontribusi</p> <p>Visi dan Misi Organisasi</p> <p>Penguatan</p> <p>Nilai Terpercaya</p>	<p>Yang bersangkutan aktif dalam memohon arahan mentor mengenai hal-hal yang diperlukan dalam pengumpulan data HPL</p>	

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
 NIP : 19921115 202204 2 001
 Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN
 Provinsi Jawa Barat
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Isu : Belum Optimalnya Kualitas Data Hak Pengelolaan di
 Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
 Gagasan : Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan
 Memanfaatkan *Google Drive* Sebagai Penyedia Layanan
 Penyimpanan Data Pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Kegiatan 5: Meminta Data Kepada Para Pemegang Hak Untuk Mengetahui Masih Dikuasai atau Tidaknya HPL dan Penggunaannya Saat Ini

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat format surat permintaan data kepada beberapa pemegang hak 2. Membuat format tabel untuk diisi oleh Pemegang Hak terkait penggunaan HPL saat ini dan menguploadnya ke <i>Google Drive</i> untuk mempermudah Pemegang Hak mengisi data 3. Menyiapkan Surat Permintaan data HPL dan mengirimkannya kepada para pemegang hak <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Bukti Kegiatan 2. Surat Permintaan Data HPL kepada beberapa pemegang HPL yang sudah dikirim <p>Keterkaitan</p> <p>Tahap Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kompeten - Loyal <p>Tahap Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Adaptif <p>Tahap Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kolaboratif 	<p>Yang bersangkutan aktif dalam meminta arahan mentor dalam menyusun tahapan-tahapan pengumpulan data HPL serta mencari solusi terhadap hambatan dan kesulitan</p>	

Kontribusi Misi Organisasi Penguatan Nilai Profesional		
---	--	--

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
 NIP : 19921115 202204 2 001
 Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN
 Provinsi Jawa Barat
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Isu : Belum Optimalnya Kualitas Data Hak Pengelolaan di
 Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
 Gagasan : Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan
 Memanfaatkan *Google Drive* Sebagai Penyedia Layanan
 Penyimpanan Data Pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Kegiatan 6: Membandingkan data rekap HPL yang dikirimkan oleh Kantah dengan data HPL dalam KKP

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyandingkan data rekap HPL yang dikirim kantah dan data rekap HPL yang terdapat di KKP 2. Merinci data HPL dalam rekapitulasi yang dikirim kantah yang belum di input ke KKP 3. Merinci data HPL dalam KKP yang tidak sesuai dengan data rekap HPL yang dikirim oleh Kantah <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Bukti Kegiatan 2. Rincian data rekap HPL yang belum di input di KKP 3. Rincian data KKP yang tidak sesuai dengan data rekap HPL <p>Keterkaitan</p> <p>Tahap Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kompeten - Adaptif <p>Tahap Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kompeten <p>Tahap Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kompeten <p>Kontribusi</p> <p>Visi dan Misi Organisasi</p> <p>Penguatan</p> <p>Nilai Terpercaya</p>		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
 NIP : 19921115 202204 2 001
 Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN
 Provinsi Jawa Barat
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Isu : Belum Optimalnya Kualitas Data Hak Pengelolaan di
 Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
 Gagasan : Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan
 Memanfaatkan *Google Drive* Sebagai Penyedia Layanan
 Penyimpanan Data Pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Kegiatan 7 : Membuat Google forms untuk melakukan pembaharuan atau updating data HPL dikemudian hari dan Panduan cara menggunakannya

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat google forms terkait pembaharuan data dikemudian hari yang dapat diajukan dari masing-masing kantah beserta update file yang mana format telah ditentukan sebelumnya Membuat panduan untuk melakukan pembaharuan data dikemudian hari <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> Print Screen Google Forms Panduan untuk mengakses dan melakukan pembaharuan atau updating data HPL <p>Keterkaitan</p> <p>Tahap Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabel - Kompeten - Adaptif - Kolaboratif <p>Tahap Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kolaboratif <p>Kontribusi</p> <p>Misi Organisasi</p> <p>Penguatan</p> <p>Nilai Profesional</p>		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
 NIP : 19921115 202204 2 001
 Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN
 Provinsi Jawa Barat
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Isu : Belum Optimalnya Kualitas Data Hak Pengelolaan di
 Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat
 Gagasan : Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan dengan
 Memanfaatkan *Google Drive* Sebagai Penyedia Layanan
 Penyimpanan Data Pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Kegiatan 8: Menyusun Laporan Aktualisasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang telah selesai dilaksanakan Merinci data HPL dalam rekapitulasi yang dikirim kintah yang belum di input ke KKP 2. Menyusun laporan aktualisasi Output 1. Foto Bukti Kegiatan 2. Laporan Aktualisasi Keterkaitan Tahap Pertama: - Akuntabel - Kompeten Tahap Kedua: - Akuntabel - Kompeten Kontribusi Visi dan Misi Organisasi Penguatan Nilai Profesional		

LAPORAN MINGGUAN

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
 Minggu ke- : 1 (satu)
 Tanggal : 11 Juli 2022 s.d. 15 Juli 2022
 Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil
 Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Kegiatan 1: Membuat akun Google Drive sebagai website yang menyediakan layanan penyimpanan data untuk merekapitulasi data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Selesai (Tanggal -Bulan)	Keterangan
1	Membuat akun Google Drive sebagai website yang menyediakan layanan penyimpanan data untuk merekapitulasi data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	Konsultasi dengan mentor untuk mempergunakan akun <i>google drive</i> Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran	1. Foto bukti kegiatan 2. Screens hoot akun <i>google drive</i> 3. Link <i>google drive</i>	11 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rancangan aktualisasi
		Membuat akun <i>google drive</i> dan menyusun folder perKantah			Telah dilaksanakan sesuai jadwal namun terdapat perubahan pada rancangan aktualisasi terkait kegiatan dan nilai berakhlak
		Membuat link untuk memudahkan kantah mengakses atau mengupload data rekapitulasi			Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rancangan aktualisasi

Yang membuat laporan



Amalia Hardiani, S.H.

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

1. Realisasi Kegiatan

Pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, telah dilaksanakan konsultasi dengan mentor untuk meminta izin mempergunakan akun gmail bidang PHP agar dapat memanfaatkan fitur penyimpanan *google drive* untuk menyimpan data HPL dari Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung. Namun akun gmail pada bidang PHP ternyata tidak ada yang mengetahui *password* untuk mengaksesnya sehingga Penulis diminta mentor untuk membuat akun gmail baru yang juga dapat digunakan oleh Bidang kedepannya. Penulis membuat akun gmail Bidang PHP dengan nama bidangphpkanwiljabar@gmail.com.

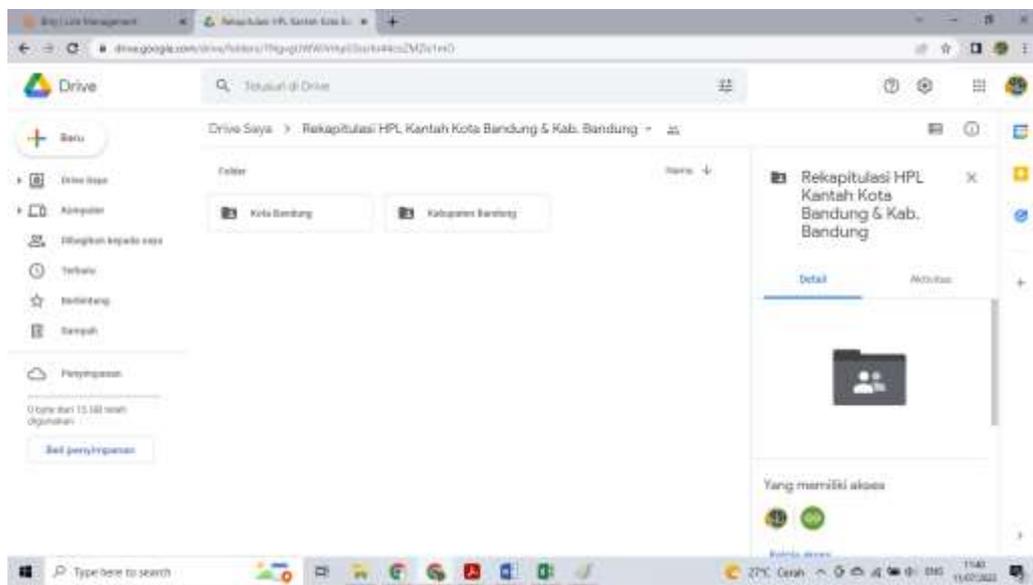
Setelah membuat akun google, Penulis kemudian memanfaatkan fitur *google drive* untuk penyimpanan data dan membuat folder perkantah serta dilanjutkan dengan membuat link agar kantah-kantah yang akan dimintakan data HPL dapat mengakses dan mengupload data tersebut. Linknya yaitu <https://drive.google.com/drive/folders/1NgvgUWWiVrhplJ3scrkr44coZMZls1mO>. Namun link tersebut agar tidak terlalu panjang, Penulis memanfaatkan website Bit.ly yang memberikan fasilitas untuk meringkas atau memperpendek link. Link yang dibuat dan akan dibagikan kepada kantah-kantah dan dimanfaatkan untuk penyimpanan data rekap HPL yaitu <https://bit.ly/3HS77Fp>.

Pada kegiatan pertama ini Penulis menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK yang mana pada tahapan pertama penulis berkonsultasi dengan mentor untuk meminta masukan dan saran dengan tujuan menambah pengetahuan dan kompetensi penulis terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bahasa yang baik dan benar yang berarti pada tahap ini telah diterapkan nilai Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif. Pada tahap kedua, Penulis memanfaatkan teknologi masa kini dengan membuat akun gmail bidang PHP untuk memudahkan Kantah dalam mengakses data dan mengupload data HPL serta

memanfaatkan fitur google drive. Penulis mempelajari mengenai cara penggunaannya dengan browsing di internet. Pada tahap ini telah diterapkan nilai Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten dan Adaptif. Pada tahapan ketiga penulis membuat link untuk memudahkan kantah mengakses google drive dengan sekali klik. Pada tahap ini penulis menerapkan nilai Berorientasi pelayanan, Kompeten, dan Adaptif.

2. Evidence

Screenshot akun google drive yang sudah dibuatkan folder perkantah



Link akun Google Drive
<https://bit.ly/3HS77Fp>

Kegiatan 2: Berkoordinasi dengan Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Selesai Tanggal-Bulan	Keterangan
2	Berkoordinasi dengan Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung	Konsultasi dengan mentor terkait dengan rencana kegiatan untuk berkoordinasi dengan kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	1. Foto bukti kegiatan konsultasi dengan mentor 2. Surat permintaan data rekapitulasi HPL kepada Kepala Kantah Kota Bandung dan Kepala Kantah Kabupaten Bandung	12 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi dan jadwal
		Membuat format surat permintaan data HPL untuk keperluan rekapitulasi di Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung			Telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi namun jadwal dipercepat
		Mengirimkan Surat kepada Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung		12 Juli 2022 s.d. 15 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi namun jadwal dipercepat

Yang membuat laporan



Amalia Hardiani, S.H.

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

1. Realisasi Kegiatan

Pada tanggal 12 Juli 2022 penulis membuat format Surat Permintaan Data HPL dalam rangka rekapitulasi dan updating HPL kepada Kantah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, yang mana format isi surat tersebut dibuat berdasarkan format surat yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Surat tersebut dibuat dengan bahasa yang baik dan benar atas saran mentor yang dapat memudahkan untuk berkoordinasi dengan kantah-kantah yang akan dimintakan data HPL nya oleh Penulis. Kemudian Penulis mengirimkan surat yang pertama kepada Kantah Kota Bandung dengan mengantarkannya langsung pada tanggal 12 Juli tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 Penulis mengirimkan Surat Permintaan Data HPL ke Kantah Kabupaten Bandung secara langsung.

Pada kegiatan kedua ini Penulis telah menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK yang mana pada tahapan pertama penulis berkonsultasi dengan mentor untuk meminta saran pembuatan format surat permintaan data HPL dengan bahasa yang baik dan sopan sehingga penulis telah menerapkan nilai kompeten, harmonis dan kolaboratif. Pada tahap kedua membuat format surat permintaan data HPL dengan mempelajari peraturan tentang tata naskah dinas dan menerapkan nilai akuntabel, loyal dan kolaboratif. Tahap ketiga penulis mengirimkan surat tersebut kepada kantah kota bandung dan kabupaten bandung agar dapat bekerja sama dalam mendata HPL yang valid dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel harmonis dan kolaboratif.

2. Evidence

Kegiatan konsultasi dengan mentor



Surat Permintaan data HPL ke Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung

 **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT**
Jalan Sookarno Hatta No. 586 Bandung Telp. (022) 7562057 email : jabar@atrpn.go.id

Nomor : AT.01.03/1444-32.300/VII/2022 Bandung, 12 Juli 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permintaan data dalam rangka Rekapitulasi dan *Updating* data HPL.

Yth.
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Di - Tempat

Bahwa dalam rangka keperluan rekapitulasi dan *updating* Data Hak Pengelolaan di Provinsi Jawa Barat, bersama ini mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan data Hak Pengelolaan yang berlaku di wilayah *kerja* Saudara sesuai format terlampir dan dibuat dalam dokumen excel kemudian mengunggahnya melalui link : <https://bit.ly/3MS77Pp> . Data tersebut paling lambat diterima oleh kami pada tanggal 15 Juli 2022.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran


Mejana Irawan Sukarja, S.H.
NIP. 19670527 199403 1 003

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)

Melisa, Pratiwi, Tanjung

Lampiran:
HPL yang masih berlaku

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat	Nama Pemegang Hak	XIB	Luar	Beker BK	Tanggal BK	Kemur Surat Ujuz	Tanggal Surat Ujuz	Letak Tanah Desa/Kelurahan Kota/Kabupaten
1										
2										
3										
4										
5										
Dst										

Melisa, Pratiwi, Tanjung

**Kegiatan 3: Mengumpulkan Data HPL di Kantah Kota Bandung dan
Kantah Kabupaten Bandung**

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Selesai Tanggal-Bulan	Keterangan
3	Mengumpulkan Data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung	Mendata HPL yang terdapat di KKP Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	1. Foto Bukti Kegiatan 2. Surat Tugas untuk mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung 3. Hasil pengumpulan data HPL di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	12 Juli 2022 s.d. 15 Juli 2022	Telah dilaksanakan dan merupakan kegiatan tambahan yang tidak ada pada rancangan namun diperlukan dalam pelaksanaan aktualisasi untuk melengkapi data HPL atas saran mentor
		Membuat format surat tugas untuk mengumpulkan data di Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung			Telah dilaksanakan dan merupakan kegiatan tambahan
		Mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung berdasarkan Buku Tanah yang ada di Arsip Kantah			Masih dalam proses pengumpulan data HPL oleh kantah

Yang membuat laporan



Amalia Hardiani, S.H.

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

1. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ke-3 ini merupakan kegiatan tambahan yang dirasa sangat diperlukan menurut mentor maupun Penulis agar dapat mengumpulkan data HPL terlebih dahulu sebelum membuat rekapitulasi serta bekerjasama dengan baik untuk menghasilkan data HPL dengan cepat dan valid. Pada tanggal 12 Juli 2022 sampai 15 Juli Penulis memanfaatkan untuk mendata HPL pada Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung yang terdapat pada KKP agar dapat membandingkannya dengan data HPL yang diperoleh dari Arsip kintah berdasarkan buku tanahnya.

Selain membuat format surat Permintaan data HPL, Penulis juga membuat format Surat Tugas yang dimaksudkan agar Penulis dapat bertugas di Kantah dan mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung secara langsung di kintah setempat dengan melihat Buku Tanah pada arsip Kantah agar data HPL yang didapat lebih valid. Jika hanya mengandalkan kintah untuk mengumpulkan data dikhawatirkan tidak dapat selesai tepat waktu dikarenakan Kantah pun pastinya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Sebaliknya jika hanya penulis yang mengumpulkan data HPL di Kantah tersebut dikhawatirkan tidak akan dapat mengumpulkan semua data karena terdapat beberapa buku tanah yang posisinya tidak di ruang arsip yang salah satu penyebabnya adalah sedang diproses SK. Oleh karena itu agar mendapat hasil yang lengkap dan baik maka perlu kerjasama yang baik antara penulis dengan Kantah.

Tanggal 12 Juli 2022 sampai 13 Juli 2022 Penulis bertugas mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung kemudian 14 Juli 2022 sampai tanggal 15 Juli 2022 Penulis memanfaatkan untuk mengumpulkan data HPL di Kantah Kabupaten Bandung dengan membawa Surat Permohonan data HPL dan juga Surat Tugas yang telah Penulis buat atas persetujuan atasan. Di Kota Bandung Penulis hanya berhasil mengumpulkan data sebanyak 36 HPL berdasarkan buku tanah yang ada pada Arsip. Sisanya buku tanah tersebut sedang dalam proses SK sehingga Penulis tidak dapat mendata semua HPL. Oleh karena itu Penulis meminta bantuan kepada Kantah untuk mengumpulkan kekurangan data dan menguploadnya ke link *google drive*. Di Kabupaten Bandung, Penulis hanya dapat mengumpulkan 2 data HPL dikarenakan buku tanah pada arsip kintah kabupaten bandung tidak tersusun rapi sehingga kintah kesulitan untuk menemukan buku tanah HPL dan juga terdapat beberapa HPL yang sedang dalam proses SK. Oleh karena itu untuk sisa data yang belum terkumpul, penulis juga meminta pihak

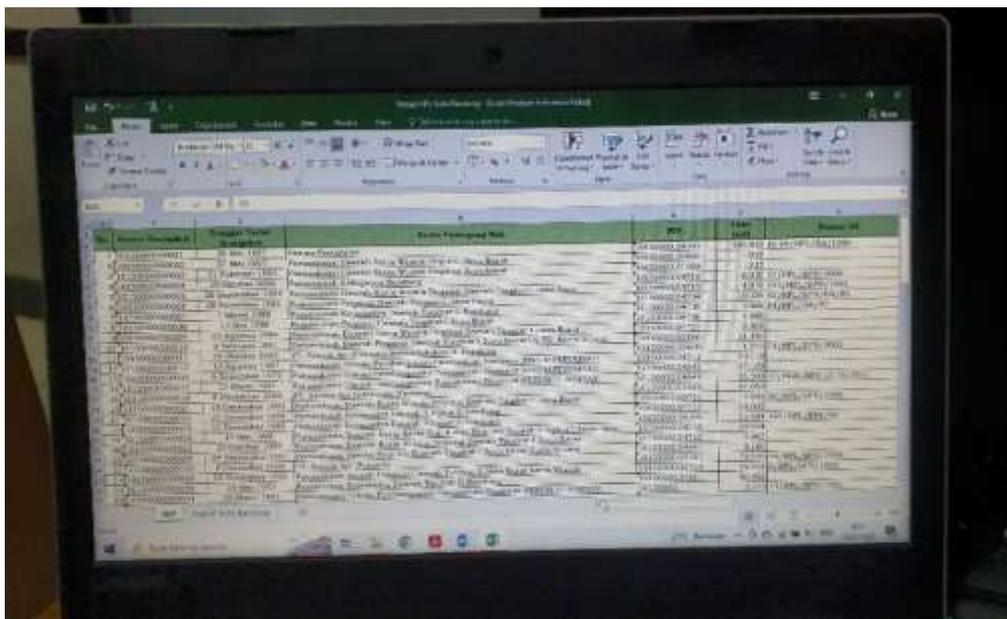
kantah Kabupaten Bandung untuk melengkapi data dan menguploadnya pada link *google drive*.

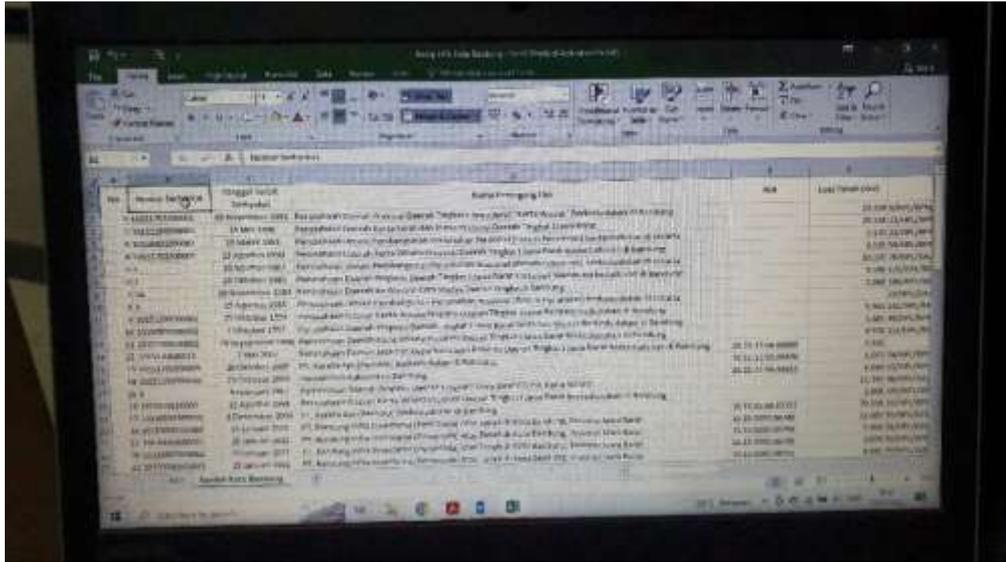
Kegiatan ketiga tahapan ke-3 ini masih dalam proses dikarenakan belum semua data HPL terkumpulkan. Penulis meminta bantuan Kantah untuk terus bekerja sama mengumpulkan data HPL dengan didasarkan pada buku tanah sehingga menghasilkan data yang lebih lengkap dan valid. Pengumpulan data HPL ini Penulis targetkan untuk selesai pada minggu kedua sehingga dapat melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu merekap data HPL dengan sistematis dan lengkap.

Pada kegiatan ketiga ini Penulis telah menerapkan nilai BerAKHLAK diantaranya pada tahap pertama penulis mendata HPL yang terdapat dalam KKP dengan teliti, cermat dan benar agar dapat mempertanggungjawabkan data yang telah dikumpulkan sehingga dalam hal ini penulis telah menerapkan nilai akuntabel dan adaptif. Kemudian pada tahap kedua penulis membuat Surat Tugas sesuai format dalam peraturan perundang-undangan agar dapat bertugas di kantah kota bandung dan kabupaten bandung mengumpulkan data HPL berdasarkan buku tanah yang dalam hal ini penulis telah menerapkan nilai Akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Kemudian pada tahap ketiga penulis mengumpulkan data HPL berdasarkan buku tanah yang terdapat pada arsip kantah dan dapat bekerjasama dengan baik dengan kantah kota bandung dan kabupaten bandung dengan menerapkan nilai Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif.

2. Evidence

Mengumpulkan data HPL Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dari KKP





Scan Format Surat Tugas mengumpulkan data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung


**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT**
 Jalan Soekarno Hatta No. 566 Bandung Telp. (022) 7542057 email : jabar@kptn.go.id

SURAT TUGAS
 NOMOR : 937/ST-32.100.AT.01.03/VII/2022

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
 Dasar : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

MEMBEH TUGAS

Kepada : Nama : Anas Harjani, S.H.
 NIP : 19921115 202204 2 001
 Pangkat/Gol. Jabatan : Penata Muda (III/a)
 Analisis Hukum Pertanahan

Untuk : Mengumpulkan data Hak Pengalihan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung
 Waktu dan Tempat Hari/Tanggal : Selasa s.d. Rabu, 12 Juli s.d. 13 Juli 2022
 Tempat : Kantor Pertanahan Kota Bandung

Bandung, 12 Juli 2022
 An. Kepala Kantor Wilayah
 Badan Pertanahan Nasional
 Provinsi Jawa Barat
 Kepala Bagian Tata Usaha

 Riyadi, A.Purb., M.H.
 NIP. 19690714 199103 1 007

Riyadi, A.Purb., M.H.


**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT**
 Jalan Soekarno Hatta No. 566 Bandung Telp. (022) 7542057 email : jabar@kptn.go.id

SURAT TUGAS
 NOMOR : 938/ST-32.100.AT.01.03/VII/2022

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
 Dasar : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

MEMBEH TUGAS

Kepada : Nama : Anas Harjani, S.H.
 NIP : 19921115 202204 2 001
 Pangkat/Gol. Jabatan : Penata Muda (III/a)
 Analisis Hukum Pertanahan

Untuk : Mengumpulkan data Hak Pengalihan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
 Waktu dan Tempat Hari/Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 14 Juli s.d. 15 Juli 2022
 Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung

Bandung, 12 Juli 2022
 An. Kepala Kantor Wilayah
 Badan Pertanahan Nasional
 Provinsi Jawa Barat
 Kepala Bagian Tata Usaha

 Riyadi, A.Purb., M.H.
 NIP. 19690714 199103 1 007

Riyadi, A.Purb., M.H.

Mengumpulkan Data HPL di Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung



LAPORAN MINGGUAN

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
Minggu ke- : 2 (dua)
Tanggal : 18 Juli 2022 s.d. 23 Juli 2022
Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil
Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Kegiatan 4: Merekap HPL di Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Selesai (Tgl-Bln)	Keterangan
4	Merekap HPL di Kota Bandung, dan Kantah Kabupaten Bandung	Berkonsultasi dengan mentor terkait proses rekap data HPL	Foto bukti kegiatan	18 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai Rancangan Aktualisasi sesuai Jadwal
		Membuat daftar perdaerah Kantah dengan mengurutkan berdasarkan nomor sertipikat	Hasil rekapitulasi HPL kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	19 Juli 2022-24 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai Rancangan Aktualisasi sesuai Jadwal
		Membuat rekapitulasi HPL		19 Juli 2022 - 24 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai Rancangan Aktualisasi sesuai Jadwal

Yang membuat laporan



Amalia Hardiani, S.H

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

1. Uraian Kegiatan

Pada tanggal 18 Juli 2022, Penulis berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan rekapitulasi HPL dimana Mentor menyarankan untuk meminta data kepada pengelola atau pemegang hak untuk optimalisasi data HPL sehingga dapat diketahui apakah tanah HPL yang telah didata benar-benar masih dikuasai dan masih digunakan sesuai peruntukannya. Untuk data HPL yang berasal dari Kantah Kota Bandung, Penulis belum menerima kiriman data dan masih menunggu Kantah tersebut untuk melengkapi data HPL yang sebelumnya terhambat akibat buku tanah yang belum terkumpul. Sedangkan untuk Kantah Kabupaten Bandung telah mengirimkan data HPL kepada Penulis.

Tanggal 19 Juli 2022, Penulis menerima kiriman data HPL yang berasal dari Kantah Kota Bandung yang melengkapi data yang sebelumnya kurang akibat buku tanah yang tidak berhasil ditemukan. Setelah itu Penulis merekap data HPL yang telah terkumpul dan menyusunnya secara sistematis berdasarkan nomor sertipikat yang mana kegiatan ini baru selesai pada tanggal 22 Juli 2022.

Pada kegiatan ke-empat ini, Penulis telah menerapkan nilai-nilai Ber-AKHLAK yang mana pada tahapan pertama Penulis telah berkonsultasi dengan mentor dengan Bahasa yang baik dan sopan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman serta meminta saran untuk kelancaran kegiatan dan agar output kegiatan yang dihasilkan dapat lebih optimal, dengan begitu Penulis telah menerapkan nilai Kompeten, Harmonis dan Kolaboratif. Untuk tahapan kedua, Penulis telah menyusun data HPL yang dikirimkan oleh kantah berdasarkan Nomor Sertipikat dengan teliti dan cermat sehingga hasilnya lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu Penulis telah menerapkan nilai Akuntabel dan Kompeten. Pada tahap ketiga, Penulis telah melaksanakan rekap data

HPL Kantah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dalam satu dokumen file secara sistematis berdasarkan Nomor Sertipikat dengan teliti dan cermat sehingga telah menerapkan nilai Akuntabel, Kompeten dan Kolaboratif.

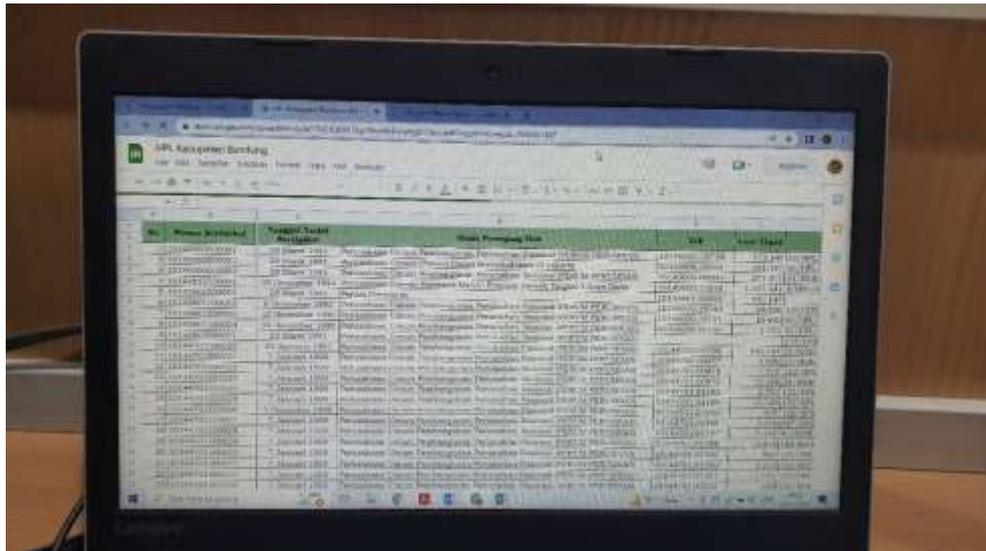
2. Evidence

Kegiatan konsultasi dengan Mentor



Data HPL yang dikirim Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung

No	Nomor Sertipikat	No. Muka Di Atas	Tanggal Surat Keputusan	Rincian Penerimaan Hak
1	211212000001	15	01 Desember 1984	Persewaan Umum Perumahan Diklat, Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang di Bandung
2	211212000002	16	14 Desember 1984	Persewaan Umum Perumahan Kantor Wilayah Kantor Wilayah Bandung Tingkat II Kota Baru
3	211212000003	17	20 Maret 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
4	110000000001	21	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
5	110000000002	22	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
6	110000000003	23	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
7	110000000004	24	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
8	110000000005	25	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
9	110000000006	26	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
10	110000000007	27	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
11	110000000008	28	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
12	110000000009	29	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
13	110000000010	30	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
14	110000000011	31	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
15	110000000012	32	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
16	110000000013	33	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
17	110000000014	34	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
18	110000000015	35	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
19	110000000016	36	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung
20	110000000017	37	21 Agustus 1985	Persewaan Umum Perumahan Perumahan, Gedung, dan Kantor, Bandung, Bandung dan Bandung



Hasil Rekap HPL Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

Rekap HPL Kota Bandung - Data Product Activation Field

No	Nomor Berkelah	Tanggal Terbit Surat	Masa Pengerjaan Hak	NB	Luas Tanah	Nomor SK
1	001/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	001/1991/0001	100	001/1991/0001
2	002/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	002/1991/0002	100	002/1991/0002
3	003/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	003/1991/0003	100	003/1991/0003
4	004/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	004/1991/0004	100	004/1991/0004
5	005/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	005/1991/0005	100	005/1991/0005
6	006/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	006/1991/0006	100	006/1991/0006
7	007/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	007/1991/0007	100	007/1991/0007
8	008/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	008/1991/0008	100	008/1991/0008
9	009/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	009/1991/0009	100	009/1991/0009
10	010/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	010/1991/0010	100	010/1991/0010

Rekap HPL Kabupaten Bandung - Data Product Activation Field

No	Nomor Berkelah	Tanggal Terbit Surat	Masa Pengerjaan Hak	NB	Luas Tanah	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Surat
1	001/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	001/1991/0001	100	001/1991/0001	20 Desember 1991	001/1991/0001
2	002/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	002/1991/0002	100	002/1991/0002	20 Desember 1991	002/1991/0002
3	003/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	003/1991/0003	100	003/1991/0003	20 Desember 1991	003/1991/0003
4	004/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	004/1991/0004	100	004/1991/0004	20 Desember 1991	004/1991/0004
5	005/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	005/1991/0005	100	005/1991/0005	20 Desember 1991	005/1991/0005
6	006/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	006/1991/0006	100	006/1991/0006	20 Desember 1991	006/1991/0006
7	007/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	007/1991/0007	100	007/1991/0007	20 Desember 1991	007/1991/0007
8	008/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	008/1991/0008	100	008/1991/0008	20 Desember 1991	008/1991/0008
9	009/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	009/1991/0009	100	009/1991/0009	20 Desember 1991	009/1991/0009
10	010/1991	20 Desember 1991	Perubahan Peruntukan dan Rencana Zonasi	010/1991/0010	100	010/1991/0010	20 Desember 1991	010/1991/0010

Kegiatan 5: Meminta Data Kepada Para Pemegang Hak Untuk Mengetahui Masih Dipergunakan atau Tidaknya HPL dan Peruntutannya Saat Ini

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Selesai (Tgl-Bln)	Keterangan
5	Meminta Data Kepada Pemegang Hak Untuk Mengetahui Masih Dipergunakan atau Tidaknya HPL dan Peruntutannya Saat Ini	Membuat format surat permintaan data kepada pemegang hak	Foto bukti kegiatan	19 Juli 2022	Telah dilaksanakan, merupakan tambahan kegiatan yang tidak ada pada jadwal dan rancangan aktualisasi
		Membuat format tabel untuk diisi oleh Pemegang Hak terkait penggunaan HPL saat ini dan menguploadnya ke <i>Google Drive</i> untuk mempermudah Pemegang Hak mengisi data	Surat Permintaan Data HPL kepada beberapa pemegang HPL	19 Juli 2022	Telah dilaksanakan, merupakan tambahan kegiatan yang tidak ada pada jadwal dan rancangan aktualisasi
		Menyiapkan Surat Permintaan data HPL dan mengirimkannya kepada pemegang hak		20 Juli 2022-21 Juli 2022	Telah dilaksanakan, merupakan tambahan kegiatan yang tidak ada pada jadwal dan rancangan aktualisasi

Yang membuat laporan



Amalia Hardiani, S.H

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan kelima ini merupakan kegiatan tambahan yang disarankan oleh mentor untuk dilaksanakan. Pada tanggal 19 Juli 2022, Penulis selain merekap data HPL yang telah dikirimkan oleh Kantah Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung, juga membuat format surat untuk meminta data HPL kepada Pemegang Hak untuk mengetahui apakah HPL yang dikuasai masih dipergunakan sesuai peruntukannya. Penulis membuat 5 surat permintaan data yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bandung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, PT. Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Perseroda) dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) atas persetujuan atasan dan juga mentor. Untuk pemegang hak atas nama PT. Bandung Infra Investama Penulis tidak mengirimkan surat dikarenakan Penulis melakukan survey langsung ke alamat yang tertera pada Buku Tanah dimana saat ini tanah tersebut dipergunakan sebagai taman kota dengan nama Kiara Artha Park yang terletak di Jalan Jakarta, Kebon Waru, Kota Bandung. Tanah tersebut menurut hasil survey Penulis baik survey ke lapangan maupun dengan menelusuri melalui internet, tanah tersebut dikerjasamakan dengan PT Mega Chandra Purabuana (MCP) untuk membangun taman Kiara Artha Park yang hingga saat ini masih dipergunakan dan dikuasai.

Tanggal 20 Juli 2022, setelah surat ditanda-tangani oleh atasan, Penulis menyiapkan segala keperluan untuk mengirimkan surat tersebut kepada para pemegang hak melalui pos dan baru selesai dikirim kepada para pemegang hak tanggal 21 Juli 2022. Setelahnya Penulis tinggal menunggu para pemegang hak mengirimkan data HPL.

Pada kegiatan kelima ini Penulis telah menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK yang mana pada tahapan pertama Penulis telah membuat surat permintaan data HPL sesuai dengan format surat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk berkoordinasi dengan para pemegang hak pengelolaan dan menghasilkan data HPL yang lebih optimal, oleh karena itu Penulis telah menerapkan nilai Akuntabel, Kompeten, Loyal, dan Kolaboratif. Pada tahap kedua, Penulis telah membuat format tabel untuk diisi oleh Pemegang Hak terkait penggunaan HPL saat ini pada *Google Drive* sehingga memudahkan para pemegang hak untuk mengisi data yang diperlukan, oleh karena itu Penulis dalam hal ini telah menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, Kolaboratif. Pada tahap ketiga, Penulis telah mengirimkan surat permintaan data HPL tersebut ke alamat para pemegang hak dengan jasa kurir yang tersedia sehingga Penulis dalam hal ini telah menerapkan nilai Akuntabel dan Kolaboratif.

2. Evidence

Membuat format surat permintaan HPL kepada beberapa pemegang Hak Pengelolaan



Lampiran:

Rekapitulasi HPL PT. Jasa dan Kepulauan Jawa Barat (Persewa)

No	Daerah	Tanggal Terbit Surat	Luas	Masih digunakan/berhak tidak digunakan	Persewa/ hak pakai
1	Frang	28 November 1986	10.300		
1	Soban, Frang	10 April 1987	4.800		
1	Soban, Frang	08 November 1987	19.524		
1	Pakelara	31 Mei 1987	3.090		
1	Bahakan, Sukabaga	11 Juli 1992	6.110		
1	Tanah Rati	12 Desember 1994	4.040		
1	Bakongede	21 Februari 1994	1.115		
1	Ciaruteun	21 Juni 1999	1.892		
1	Mertikus	22 Agustus 1999	6.500		
1	Cilimpe	22 Agustus 1999	6.500		
1	Cigugur	26 Januari 1982	1.828		
1	Kelak, Jerik	28 Juli 1988	1.013		
1		30 Maret 2017	1.213		
2	Bakongede	28 September 1994	4.970		
2	Ciaruteun	18 Desember 1990	2.201		
2	Bakongede	20 Oktober 1994	3.583		
2	Pakelara	8 Desember 1987	3.700		
2	Bahakan	8 Januari 1987	3.090		
2	Braga	13 Mei 1988	1.600		
4	Braga	23 Agustus 1994	2.008		
5	Braga	9 Februari 1987	11.342		
13	Bahakan Ciaruteun	7 Mei 2007	1.930		
16	Bakongede	9 Mei 2017	1.101		
16		20 November 2017	181		
17		12 November 2019	2.220		

Meliana Irawan Sukirja



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Sekeloa Utara No. 589 Bandung Telp. (022) 7582057 email: jabar@bptn.go.id

Nomor :
Rifat :
Lampiran :
Hal :
: Segera
: 1 (satu) Lembar
: Permintaan data dalam rangka
Rekapitulasi HPL

Bandung, 2022

Vth. Perumahan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
DI - Jl. D.I. PONDJAHAN Kav.11
Jakarta Timur

Bahwa dalam rangka kegiatan rekapitulasi Data Hak Pengelolaan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, bersama ini mohon kiranya Saudara dapat membantu untuk mengisi keterangan penggunaan dan penanaman Hak Pengelolaan sesuai format terlampir pada link: <https://bit.ly/3a6Cw52> . Data tersebut paling lambat diterima oleh kami pada tanggal 25 Juli 2022.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

Mejanto Irawan Sukarya, S.H.
NP. 15670527 199403 1 003

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)

Bilaga, Profesional, Terpercaya

Lampiran:

Rekapitulasi Aset HPL Perum Perumnas

Nomor Urut/No	Kelurahan/Desa	Kota/Kabupaten	Tanggal Terbit Sertifikat	Luas	Masih digunakan/Status tidak digunakan	Pemilik/Instansi (isi)
1	Suge	Kota Bandung	29 Maret 1991	5.178		
1	Caringin	Kota Bandung	29 Agustus 1991	16.111		
2	Pajajaran	Kota Bandung	20 Agustus 1993	104.501		
7	Indareja	Kota Bandung	20 Agustus 1993	22.553		
7	Antapani	Kota Bandung	11 Juli 1991	485.853		
7	Margasari	Kota Bandung	2 Maret 1998	72.329		
7	Tribrata	Kota Bandung	23 Maret 1991	184.848		
17	Cipenda	Kota Bandung	14 Maret 1994	98.305		
1	Cikaragalla	Kota Bandung	28 Desember 1979	17.108		
1	Salug Bayan	Kota Bandung	29 Juli 1985	89.791		
1	Sumasari	Kota Bandung	29 Agustus 1991	219.261		
1	Kawankanki Wetan	Kabupaten Bandung	28 Maret 1991	271.148		
2		Kabupaten Bandung	28 Maret 1991	271.378		
7		Kabupaten Bandung	28 Maret 1991	201.497		
2	Kawankanki Wetan	Kabupaten Bandung	28 Desember 1991	24.826		
2		Kabupaten Bandung	28 Desember 1991	18.405		
4		Kabupaten Bandung	28 Desember 1991	4.745		
28	Kawankanki Wetan	Kabupaten Bandung	28 Maret 1991	303.184		
21	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	1.300		
21	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	1.212		
21	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	13.106		
21	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	4.292		
21	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	18.218		
28	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Desember 1998	475		
27	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	1.218		
28	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	1.142		
29	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	1.472		
30	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	246		
31	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	1.211		
32	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	1.202		
33	Ngapak	Kabupaten Bandung	7 Agustus 1999	143		

Bilaga, Profesional, Terpercaya

Mengirimkan Surat permintaan data HPL kepada beberapa pemegang Hak



LAPORAN MINGGUAN

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
Minggu ke- : 3 (tiga)
Tanggal : 25 Juli 2022 s.d. 30 Juli 2022
Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil
Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Kegiatan 6: Merekap HPL di Kantah Kota Bandung dan Kantah Kabupaten Bandung

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Selesai (Tgl-Bln)	Keterangan
6	Membandingkan data rekap HPL yang dikirimkan oleh Kantah dengan data HPL dalam KKP	Menyandingkan data rekap HPL yang dikirim kantah dan data rekap HPL yang terdapat di KKP	Foto bukti kegiatan	25 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai Rancangan Aktualisasi dan sesuai Jadwal
		Merinci data HPL dalam rekapitulasi yang dikirim kantah yang belum di input ke KKP	Rincian data rekap hpl yang belum di input ke KKP	26 Juli 2022- 27 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai Rancangan Aktualisasi dan sesuai Jadwal
		Merinci data HPL dalam KKP yang tidak sesuai dengan data rekap HPL yang dikirim oleh Kantah	Rincian data HPL dalam KKP yang tidak sesuai dengan data rekap	28 Juli 2022 – 29 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai Rancangan Aktualisasi dan sesuai Jadwal

Yang membuat laporan



Amalia Hardiani, S.H

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

1. Uraian

Pada tanggal 25 Juli 2022, Penulis menunggu hasil kiriman data dari para pemegang hak yang dimana pada surat permintaan data sebelumnya penulis memberi batas waktu sampai tanggal 25 Juli 2022 untuk para pemegang hak mengirimkan data tersebut, namun hingga tengah malam hanya ada satu pemegang hak yang mengirmkan data HPL sesuai dengan data yang diminta oleh Penulis yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional sehingga Penulis terhambat untuk mengumpulkan data HPL tersebut. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Penulis mendapatkan data HPL yang dikirimkan oleh pihak PT. Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat yang dikirimkan secara langsung ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tempat Penulis bekerja. Kemudian pada hari Jumat, 29 Juli 2022, Penulis menerima kiriman data HPL dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 25 Juli 2022 sampai 29 Juli 2022, Penulis lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu membandingkan data rekap HPL yang dikirimkan oleh Kantah dengan data HPL dalam KKP untuk kemudian di rinci data mana saja yang terdapat dalam data rekap yang belum di input ke KKP dan data mana saja pada KKP yang tidak sesuai dengan data rekap HPL dimana untuk Kota Bandung Penulis telah menemukan 10 data rekap HPL yang belum diinput ke KKP, sementara untuk Kabupaten Bandung Kantah telah menginput semua data HPL namun ada beberapa rincian data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan berdasarkan data yang dikirimkan oleh pemegang hak. Sementara untuk optimalisasi data HPL, Penulis telah menambahkan rincian data berupa peruntukan tanah berdasarkan sertipikat, rincian data mengenai masih dikuasai atau tidaknya HPL dan rincian mengenai penggunaan HPL pada saat ini berdasarkan data yang dikirimkan oleh pemegang hak yang mana rincian data ini tidak

ada dalam KKP. Kegiatan ini baru selesai Penulis kerjakan pada tanggal 29 Juli 2022.

Pada tahap kegiatan pertama penulis telah menganalisis data HPL yang telah dikirim kintah dan di data oleh Penulis dengan cermat dan teliti agar lebih menghasilkan data yang berkualitas serta memanfaatkan KKP yang merupakan aplikasi terkini yang dimiliki ATR/BPN yang salah satunya adalah mendata kegiatan pertanahan di Indonesia, oleh karenanya penulis telah menerapkan nilai BerAKHLAK yaitu Akuntabel, Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif. Untuk tahap kegiatan kedua Penulis telah menerapkan nilai Akuntabel dan Kompeten dengan merinci data mana saja yang belum di input ke KKP. Selanjutnya untuk tahapan kegiatan ketiga Penulis telah merinci data mana saja pada KKP yang tidak sesuai dengan data pada rekap HPL dengan menerapkan nilai Akuntabel dan Kompeten. Membandingkan data ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan data pada KKP serta menghasilkan data rekap HPL yang lebih optimal serta valid sesuai dengan buku tanah pada arsip.

2. Evidence

Data HPL dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Nomor Sertifikat HPL	Nomor Sertifikat sebagai Pengganti Nomor	Kelurahan/Desa	Kota/Kabupaten	Tanggal Terbit Sertifikat	Luas	Masih dikonsul/ditidak dikonsul	Pengguna saat ini
1	31	1	Kayu	Kota Bandung	30 Maret 1991	5.170	Sudah tidak dikonsul	
2	12	1	Carugay	Kota Bandung	10 Agustus 1987	20.110	Sudah tidak dikonsul	
3	42	1	Sukamanda	Kota Bandung	13 Agustus 1985	136.500	Sudah tidak dikonsul	
4		1	Ciburuti	Kota Bandung	04 Agustus 1987	80.900	Sudah tidak dikonsul	
5	1	1	Ampayan	Kota Bandung	11 Juni 1987	483.800	Masih dikonsul	Beberapa Perumahan Rumsosari
6	35	1	Magasari	Kota Bandung	2 Maret 1989	77.325	Sudah tidak dikonsul	
7		1	Sukamahi	Kota Bandung	30 Maret 1991	154.840	Sudah tidak dikonsul	
8	17	1	Cijerah	Kota Bandung	13 Maret 1984	89.300	Sudah tidak dikonsul	
9	15	1	Cikurugay	Kota Bandung	06 Desember 1979	17.100	Sudah tidak dikonsul	
10	39	1	Sedang Sedang	Kota Bandung	15 Juli 1980	88.281	Sudah tidak dikonsul	
11	41	1	Sukarasa	Kota Bandung	10 Agustus 1985	370.180	Sudah tidak dikonsul	
12	3		Rancasari Wetan	Kabupaten Bandung	28 Maret 1991	272.140		
13	3	1	Rancasari Kembara	Kabupaten Bandung	28 Maret 1991	267.340	Sertifikat tidak hilang	Proses Perbaikan untuk Daftar 2
14	2	1	Bojogeloe	Kabupaten Bandung	28 Maret 1991	101.147	Masih dikonsul	Proses Perbaikan untuk Daftar 2
15	3	2	Rancasari Wetan	Kabupaten Bandung	4 Desember 1992	18.222	Masih dikonsul	Proses Perbaikan untuk Daftar 2
16	3		Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	18 November 1996	30.485		
17	4		Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	18 November 1996	1.745		
18	1		Rancasari Wetan	Kabupaten Bandung	28 Maret 1991			
19	20	1	Sagala	Kabupaten Bandung	29 Agustus 1997	109.184	Masih dikonsul	Proses Perbaikan untuk Daftar 2
20	21	12	Nawaa	Kabupaten Bandung	7 Januari 1999	5.380	Masih dikonsul	Proses Perbaikan untuk Daftar 2

Data HPL dari PT. Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat

Nomor Sertipikat HPL	Nomor sertipikat sebelum penggantian nomor	Kelurahan	Tanggal Terbit Sertipikat	Luas	Masih dikuasai/ sudah tidak dikuasai	Penggunaan saat ini
1		Taman Sari	13 Desember 1994	4.040		
1		Citarum	21 Juni 1989	1.882	Maasih Dikuasai	Mall BIP
13	1	Babakan Ciamis	7 Mei 2007	1.932	Maasih Dikuasai	Ex Hotel Corner
1	1	Balonggede	21 Februari 1994	1.113	Maasih Dikuasai	Lahan Mall Palaguna
2	2	Balonggede	28 September 1994	4.970	Maasih Dikuasai	Lahan Mall Palaguna
6	1	Braga	28 November 1985	10.305		
8	3	Braga	13 Mei 1988	1.660		
4	4	Braga	23 Agustus 1994	2.008	Sudah Tidak Dikuasai	Gedung YPK
5	5	Braga	9 Februari 1987	11.342	Maasih Dikuasai	Grand Hotel Preanger
2	2	Citarum	18 Desember 1990	3.591	Maasih Dikuasai	Hotel Aryaduta
2	3	Kacapiring	25 Oktober 1994	5.965	Maasih Dikuasai	Pertokoan/Bengkel
1	2	Karanganyar	24 September 1987	8.180	Maasih Dikuasai	Ruko Capital
1	1	Kebon Pisang	05 November 1992	19.524	Maasih Dikuasai	Rumintang Siang, Toko, Rumah
1	1	Merdeka	23 Agustus 1990	6.535	Maasih Dikuasai	Mall BIP
50		Balonggede	9 Mei 2017	1.101	Maasih Dikuasai	Lahan Mall Palaguna
52	1	Paledang	5 Januari 1987	3.080	Maasih Dikuasai	Ruko Cikowso
53	2	Paledang	5 Januari 1987	2.905	Maasih Dikuasai	Ruko Cikowso
54	1	Kebon Jeruk	10 April 1987	4.833	Maasih Dikuasai	Ruko Luxor

Data HPL dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Nomor Sertipikat	Kelurahan	Tanggal Terbit Sertipikat	Luas	Masih dikuasai/Sudah tidak dikuasai	Penggunaan saat ini
1	Sukamiskin	03 Agustus 2016	23.528	Maasih dikuasai	Dikerjasamakan dengan PT Pakar Indah untuk Lapangan
49	Sukamiskin	23 September 2016	465.118	Maasih dikuasai	Dikerjasamakan dengan PT Pakar Indah untuk Lapangan

Membandingkan data HPL pada KKP dengan data rekap HPL berdasarkan Buku Tanah.



Data HPL yang belum di input ke KKP dan data KKP yang tidak sesuai

Rekapitulasi HPL: Data Banking dan Kabupaten Bandung - Total (Produk Activation Total)

No	Urut	Periode	Detail	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir
65	1	24 Desember 1987	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar Kerya Wilaya	0,000	2794,881000	2794,881000
66	1	20 Desember 1983	Minimasi Penyalangan/Peperangan Perumahan	2,000	2084,881000	2084,881000
67	1	26 Januari 1993	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	1,000	1084,881000	1084,881000
68	1	27 Juli 1993	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	1,000	1084,881000	1084,881000
69	1	12 Desember 1994	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	1084,881000	1084,881000
70	1	16 Desember 1994	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	21,500	1106,381000	1106,381000
71	1	20 Jan 1995	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	1,000	1107,381000	1107,381000
72	1	20 Jan 1995	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	214,140	1321,521000	1321,521000
73	1	20 Jan 1995	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	91,810	1413,331000	1413,331000
74	1	20 Jan 1995	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	287,540	1700,871000	1700,871000
75	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	1.047.540	2748,411000	2748,411000
76	1	20 Jan 1995	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
77	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
78	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
79	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
80	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
81	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
82	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
83	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
84	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
85	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
86	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
87	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
88	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
89	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
90	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
91	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
92	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
93	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
94	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
95	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
96	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
97	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
98	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
99	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000
100	1	16 Desember 1998	Penurunan Utang-Piutang Daerah Tingkat I, Sewilawar	0,000	2748,411000	2748,411000

Data HPL yang belum di input ke KKP dan data KKP yang tidak sesuai

Kegiatan 7: Membuat Google forms untuk melakukan pembaharuan atau updating data HPL dikemudian hari dan Panduan cara menggunakannya.

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Selesai (Tgl-Bln)	Keterangan
7	Membuat Google forms untuk melakukan pembaharuan atau updating data HPL dikemudian hari dan Panduan cara menggunakannya	Membuat google forms terkait pembaharuan data dikemudian hari yang dapat diajukan dari masing-masing kantah beserta update file yang mana format telah ditentukan sebelumnya	<i>Printscreen Google Forms</i>	30 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai Rancangan Aktualisasi dan sesuai Jadwal
		Membuat panduan untuk melakukan pembaharuan data dikemudian hari	Panduan untuk mengakses dan melakukan pembaharuan atau updating data HPL	30 Juli 2022	Telah dilaksanakan sesuai Rancangan Aktualisasi dan lebih cepat dari jadwal

Yang membuat laporan



Amalia Hardiani, S.H

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output **(Di lengkapi dengan Evidence)**

1. Uraian Kegiatan

Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, Penulis telah melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu membuat panduan untuk di kemudian hari melakukan Updating data HPL baik itu untuk mendata HPL yang baru diterbitkan atau memperbaharui data HPL yang mengalami perubahan dengan membuat google forms untuk memudahkan Kantah dalam mengisi data HPL kemudian di input pada google drive sehingga data HPL pada Google drive selalu aktual. Selanjutnya Penulis membuat panduan dalam bentuk brosur digital yang berisi petunjuk cara melakukan updating atau pembaharuan data HPL sehingga dapat terdata di google drive. Yang kemudian hasilnya Penulis kirimkan kepada kantah baik Kantah Kota Bandung maupun Kantah Kabupaten Bandung dan mengimbau agar mereka dapat selalu mengupdate data rekap HPL tersebut pada google drive dengan mengisi google forms melalui link <https://bit.ly/3BtoYRN>. Dan bagi kantah yang ingin mengunduh file rekap HPL tersebut dapat mengklik link <https://bit.ly/3S6pPOh> untuk Kantah Kota Bandung. Sedangkan untuk Kantah Kabupaten Bandung dapat mengunduh melalui link <https://bit.ly/3Bt4Hfe>.

Pada tahap pertama kegiatan ini Penulis telah membuat google forms yang memudahkan Kantah dalam mengupdate data rekap HPL pada google drive dengan memanfaatkan teknologi terkini, oleh karena itu Penulis telah menerapkan nilai berAKHLAK yaitu Akuntabel, Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif. Untuk tahap dua kegiatan ini Penulis membuat panduan untuk mengupdate data HPL pada google drive agar data yang terdapat pada google drive dapat selalu aktual, oleh karenanya Penulis telah menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel dan Kolaboratif.

LAPORAN MINGGUAN

Nama : Amalia Hardiani, S.H.
Minggu ke- : 4 (empat)
Tanggal : 1 Agustus 2022 s.d. 7 Agustus 2022
Unit Kerja : Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil
Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Kegiatan 8:Menyusun Laporan Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Selesai (Tanggal -Bulan)	Keterangan
8	Menyusun Laporan Kegiatan Aktualisasi	Konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang telah selesai dilaksanakan	1. Foto bukti kegiatan 2. Laporan Aktualisasi	1 Agustus 2022 s.d. 7 Agustus 2022	Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rancangan aktualisasi
		Mengumpulkan Evidence			Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rancangan aktualisasi
		Menyusun laporan aktualisasi			Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rancangan aktualisasi

Yang membuat laporan



Amalia Hardiani, S.H.

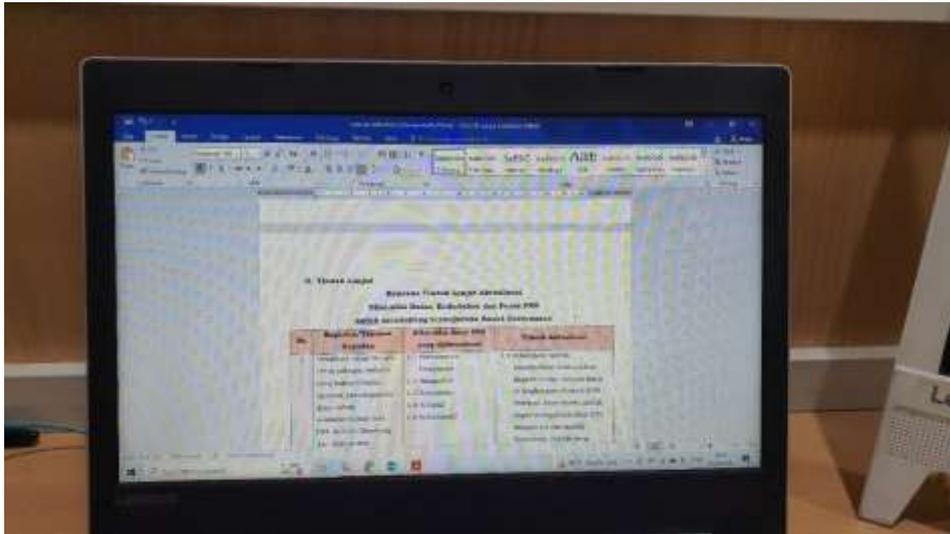
Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

1. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir pada Tahap Aktualisasi ini. Penulis laksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 untuk menyusun laporan kegiatan aktualisasi yang telah Penulis laksanakan selama kurang lebih 1 bulan sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai 7 Agustus 2022. Pada tahap ini Penulis menuangkan hasil atau output dari kegiatan aktualisasi tersebut yaitu optimalisasi rekapitulasi Hak Pengelolaan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yaitu untuk wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Penulis juga mengumpulkan semua evidence atau bukti kegiatan yang telah penulis laksanakan selama 1 bulan Aktualisasi untuk dicantumkan dalam laporan aktualisasi. Kemudian Penulis juga membuat link untuk mengakses rekapitulasi Hak Pengelolaan Provinsi Jawa Barat pada google drive yaitu <https://bit.ly/Rekapitulasi-HPL-Jabar>

Pada kegiatan kali ini Penulis telah menerapkan nilai BerAKHLAK yaitu nilai Akuntabel, karena laporan aktualisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Penulis terhadap kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Kompeten karena Penulis telah mengerjakan laporan aktualisasi ini dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kolaboratif karena penyusunan laporan aktualisasi ini merupakan hasil kerjasama penulis dengan beberapa pihak yaitu Mentor, Kantor Kota Bandung, Kantor Kabupaten Bandung, rekan-rekan Penulis di bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran dan juga para pemegang hak yang sudah mengirimkan data HPL.

2. Evidence



**KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT**

REKAPITULASI HAK PENGELOLAAN PROVINSI JAWA BARAT

KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUMAH
KAWASAN

SCAN QR



**Akses Dokumen
Rekapitulasi HPL
Provinsi Jawa Barat**

<https://bit.ly/Rekapitulasi-HPL-Jabar>

(022) 7567576 | jabar@atrbpn.go.id | www.jabar.atrbpn.go.id

BIODATA PENULIS



Nama :

Amalia Hardiani, S.H, M.Kn

Alamat :

Jl. Puri Dago IV No.26, Kel.
Sukamiskin, Kec. Arcamanik,
Kota Bandung

NIP :

199211152022042001

Jabatan:

Analisis Hukum Pertanahan

Email :

amaliahardiani92@gmail.com

No. HP :

082119909939

Penulis dilahirkan di Majalengka pada tanggal 15 November 1992. Penulis menempuh pendidikan Dasar SD Negeri Kalijaga Permai Kota Cirebon pada tahun 1999 dan lulus pada tahun 2005. Setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 2 Cirebon pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Cirebon dengan jurusan IPA pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Setelah tamat SMA, penulis melanjutkan studi ke Universitas Padjadjaran, Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menempuh pendidikan tersebut selama lima tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2016. Setelah menempuh pendidikan Sarjana, penulis melanjutkan Proram Studi Magister Kenotariatan di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2019.

Kemudian penulis sempat bekerja di Kantor Notaris Nining Puspitaningtyas selama 1 Tahun sejak tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya Penulis mengikuti seleksi CPNS pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan jabatan yang dilamar sebagai Analisis Hukum Pertanahan. Alhamdulillah penulis lulus dan berstatus sebagai CPNS sejak Desember 2021 serta mulai bekerja terhitung sejak 9 Mei 2022 ditempatkan di unit kerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat